**Kepemimpinan Presiden Indonesia**

**Asran Jalal**

**Universitas Nasional**

**Pendahuluan**

 Indonesia semenjak merdeka tahun 1945, sudah memilik memiliki 7 orang presiden. Presiden Soekarno memerintah tahun 1945-1967, Presiden Soeharto memerintah pada tahun 1967-1998, Presiden B.J. Habibie memerintah tahun 1998-1999, Presiden Abdurrahman Wahid memerintah tahun 1999-2001, Presiden Megawati Soekarnoputri memerintah tahun 2001-2004, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintah tahun 2004-2014, Presiden Joko Widodo memerintah mulai tahun 2014, kemungkinan sampai 2024.

Presiden Soekarno dipilih menjadi berdasarkan keputusan Panitian Kemerdekaan Republik Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945. Keputusan PPKI salah satunya adalah, menetapkan Soekarno dan Mohammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI.[[1]](#footnote-1) Presiden Soekarno diberhentikan MPRS melalui melalui Tap MPRS No. XXXIII/MPRS/1967. Alasannya krisis politik yang terjadi tahun 1965 yang dikenal dengan Peristiwa Gerakan 3 September (G.30 S. PKI), dimana dalam peristiwa tersebut terjadi pembunuhan 6 orang pewira tinggi Angkatan Darat, membuat situasi politik dalam keadaan krisis.

 Presiden Soeharto diangkat menjadi presiden oleh MPRS tahun 1968 melalui Tap MPRS No. XLIV tahun 1968 yang menyatakan “Mengangkat Jenderal Soeharto, Pengemban Tap MPRS No. IX/MPRS/1966 sebagai Presiden Republik Indonesia hingga terpilihnya Presiden oleh MPR hasil Pemilihan Umum (Pemilu). Jabatan sebelumnya adalah Panglima Komando Operasi Ketertiban dan Keamanan (Kopkamtib) yang diangkat Presiden Soekarno pada tanggal 2 Oktober 1965 untuk memulihkan situasi keamanan dan ketertiban. Presiden Soeharto mundur sebagai presiden pada tanggal 21 Mei 1998 atas desakan keompok proreformasi yang domotori mahasiswa.

 Wakil Presiden B.J. Habibie dilantik menjadi Presiden RI di Istana Negara dihadapan ketua Mahkamah Agung dan pimpinan MPR/DPR, setelah Presiden Soeharto menyatakan mundur dari jabatannya. Kekuasaan Presiden BJ Habibie berakhir pada tanggal 20 Oktober 1999, setelah menyatakan tidak bersedia dicalonkan MPR hasil Pemilu 1999 sebagai calon presiden RI periode 1999-2004. Sikap Presiden B.J Habibie diambil, setelah Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) ditolak dalam Sidang Umum (SU) MPR pada tanggal 14 Oktober 1999. Hasil pemungutan suara LPJ Presiden B.J Habibie dalam SU MPR, sebanyak 355 suara anggota menolak, 322 suara anggota menerima, 9 suara anggota abstain, dan 4 suara anggota tidak sah, selisih suara yang menolak dengan yang menerima adalah 355-322 = 33 suara. Penoalakan pertanggungjawaban Presiden B.J Habibie disebab yakni adanya kekhawatiran elite-elite partai akan munculnya gerakan radikal baru dalam bentuk *people power.[[2]](#footnote-2)*

 Presiden Abdurahman Wahid yang dipilih MPR hasil Pemilu 1999. Pemilu 1999 merupakan Pemilu yang berlangsung secara demokratis pertama pascaSoeharto, yang diikuti banyak partai politik. Presiden Abdurrahman Wahid diberhentikan MPR melalui Sidang Istimewa (SI) pada tanggal 23 Juli 2001, Pemberhentian Presiden Abdurahman Wahid dianggap terlibat kasus kasus Dana Yanatera Bulog dan dana sumbangan dari Sultan Brunei. Kedua kasus dimaksud dikenal dengan istilah ‘*Buloggate*’ dan ‘*Bruneigate*’.)[[3]](#footnote-3)

Presiden Megawati Soekarnoputri diangakat menjadi Presiden RI melalui Sidang Istimewa (SI) MPR pada tanggal 23 Juli 2001, menggantikan Presiden Presiden Abdurrahman Wahid. Presiden Megawati Soekarnoputri membentuk kabinet yang disebut Kabinet Gotong Royong. Kabinet ini meneruskan koalisi sebelumnya, para menteri berasal dari unsur partai politik, kecuali Partai keadilan.[[4]](#footnote-4) Jabatan Presiden Megawati Soekarnoputri berakhir pada tahun 2004, karena Megawati Soekarnoputri yang berpasangan dengan Prabowo Subianto dikalahkan oleh pasangan Soesilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kalla melalui Pemilu secara langsung.

Presiden Sosilo Bambang Yudhoyono merupakan presiden pertama menjadi presiden yang dipilih rakyat secara langsung. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terpilih menjadi pada Pemilu tahun 2004 dan pemilu tahun 2009. Pemilu tahun 2004, Pasangan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono/Yusuf Kala behasil meraih 33,58 % suara pemilih, sementar pasangan lainnya Megawati Soekarnoputri/Hasyim Muzadi meraih 26,24 % pada puran Pemilu kedua. Pada Pemilu 2009, Pasangan Soesilo Bambang Yudhoyono/Budiono Kembali terpilih menjadi presiden dengan raihan suara sebesar 60,80 %, mengalahkan pasangan Megawati Soekarnoputri/Prabowo Subianto hanya meraih suara sebesar 26,79 % suara pemilih. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam membangun kabinet tahun 2004 dan 2009 membentuk kabinet berkoalisi dengan partai pendukung.[[5]](#footnote-5) Kekuasaan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono berakhir pada Pilpres tahun 2009, hal ini sejalan dengan ketentuan sebagaimana yang diatur UUD 1945 hasil amandemen, batasan jabatan presiden hanya dua periode ini.

Presiden Joko Widodo (Presiden Jokowi) terpilih menjadi presiden hasil Pemilu langsung tahun 2014 dan tahun 2019. Pilpres tahun 2014, Presiden Jokowi berhasil menjadi presiden dengan memperoleh 53,15 % suara, mengalahkan pasangan Prabowo Subianto/Hatta Rjasa. Pemilu 2019, Presiden Jokowi berhasil jadi presiden dengan memperoleh raihan suara 55,50 % suara, mengalahkan pasangan Prabowo Subianto/Sandiaga Uno memperoleh suara 45,50%. Kabinet Presiden Jokowi hasil Pemilu 2014 bernama kabinet kerja 2014-2019, jumlah menteri kabinet sebanyak 34 yang dibentuk dibentuk pada tanggal 27 Oktober 2014 dan demisioner pada tanggal 20 Oktober 2019. Presiden Jokowi membentuk kabunet hasil Pemilu 2019, yang bernama Kabinet Indonesia Maju dengan jumlah menteri atau jabatan setingkat Menteri berjumlah 38 yang dibentuk pada tanggal 23 Oktober 2019.

 Tulisan ini hendak membahas kepemimpinan Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Alasannya adalah Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto termasuk presiden yang cukup lama menjadi presiden. Presiden Soekarno menjadi presiden selama 32 tahun, Presiden Soeharto memerintah selama 32 tahun. Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono berhasil menjadi presiden selama 2 periode berturut-turut yaitu tahun 2004 dan 2009.

 Alasan tidak memasukkan 3 presiden lainnya dalam pembahasan analisis dengan pertimabangan masa jabatan masing-masing presiden. Presiden B.J Habibie memerintah selama 1 tahun, posisinya hanya menggantikan Presiden Soeharto yang mundur dari jabatannya. Presiden Abdurrahman Wahid yang dipilih MPR hasil Pemilu demokratis, diberhentikan MPR sebelum masa jabatannya berakhir. Presiden Megawati Soekarnoputri menjadi presiden menggantikan posisi Presiden Abdirrahman Wahid, posisi Presiden Mewatisularnoputri sebelumnya adalah wakil presiden. Presiden Joko Widodo masa jabatan keduanya baru selesai tahun 2024.

 Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memilik prilaku kepemimpinan yang berbeda dan merupakan ciri khas dari masing-masing gaya kepemimpinan presiden. Herbert Feith merumuskan gaya prilaku politik Presiden Soekarno bercorak solidarty maker. Presiden Soekarno dalam menjalan kekuasaannya memiliki gaya membangun kewibawaan pemerintah (*legitimation* ) dan membangun kesan, rakyat harus punya kesan positif dan patuh pada pemerintah, mengutamakan pembangunan persatuan bangsa.[[6]](#footnote-6) Afan Gaffar merumuskan gaya kepemimpinan Presiden Soekarno dalam memerintah pada masa Demokrasi Terpimpin, bergaya diktator, karena Presiden Soekarno menjadi pemimpin yang sangat berkuasa dan menjadi seorang Presiden sangat kuat (*powerfull*) dalam mengendalikan politik Indonesia, tanpa ada satu kekuatan politik yang mampu mengimbanginya.[[7]](#footnote-7) Perwujudan prilaku Presiden Soekarno yang demikian terlihat Ketika membuarkan DPR, dilanjutkan dengan mengangkat anggota yang baru.

 Presiden Soeharto masa Orde Baru memiliki corak kepemimpinan otoriter dengan berbagai istilah yang digunakan para ilmuwan politik. Dwight Y. King menyebutnya dengan istilah rezim birokatik otoriter (*buereuctic authoritarian re*g*ime)*, karena institusi di luarnya seperti DPR dan partai politik, dan *civil society* tidak berdaya untuk mengontrol kekuasaan Presiden Soeharto.[[8]](#footnote-8)Bentuk kepemimpinan Presiden Soeharto yang demikian terlihat kebiajakannya dengan memperlakukan Daerah Operasi Militer (DOM) menghadapi Gerakan Aceh merdeka (GAM). Presiden Soeharto aspek latar belakang tantara, jabatan terakhir sebelum menjabat presiden sebagai Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad). Pada saat menjabat presiden, Indonesia mengalami krisis politik dan ekonomi.

 Kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memiliki model atau gaya kepemimpinan dengan ciri moderat, mementingkan intelektualitas, keterbukaan pikiran, pola penalaran sistemik, kebutuhan prestasi, kebutuhan afiliasi, dan mejaga wibawa dalam melaksanakan kekuasaannya.[[9]](#footnote-9) Salah perwujudan prilaku Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono yang moderat dan adatif adalah selama 2 kali menjadi presiden menyertakan semua partai politik koalisi dalam kabinet. Presiden Soeslo Bambang Yudhoyono berlatar belakang tantara, jabatan terakhir dalam struktur tantara adalah Kepala Sosial Politik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Kasospol ABRI). Aspek kultur, Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono berasal dari masyarakat Jawa. Situasi sosial politik masyarakat Indonesia Ketika menjadi presiden sedang menghadapi eforia demokrasi.

 Penjelasan tersebut memberikan gambaran, terdapat persamaan dan perbedaan ketiga presiden tersebut di atas dalam hal prilku kepemipinan dalam mengunakan kekuasaannya. Persamaan aspek corak prilaku kepemimpinan antara Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto memiliki persamaan lebih cenderung bergaya otoritarian dalam menggunakan kekuasaannya. Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono cenderung bergaya demokratis. Aspek latar belakang karir politik, Presiden Soekarno berlatar belakang sipil, Presiden Soeharto dan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono berlatar belakang tantara. Persamaan ketiaga presiden tersebut dari aspek budaya, sama-sama berasal dari masyarakat Jawa. Perbedaan yang melekat adalah lingkungan politik an ekonomi masyarakat yang dihadapi saat menjabat sebagai presiden.

 Berdasarkan uraian di atas, pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini pertama variabel apa yang mempengaruhi kepemimpinan Presiden Soekarno dikatagorikan bergaya solidarity maker? Bagaimana dengan kepemimpinan Presiden Soeharto dan Presiden Soesilo Bambang Yudhyono? apa kepemimpinan Presiden Soeharto masuk dalam dikatagorikan bergaya kepemimpinan solidarity maker dan kepemimpinan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono termasuk gaya kepemimpinan administator dalam menggunakan kekuasaannya? Kedua, variabel apa yang mempengaruhi kepemimpinan Presiden Soaharto dan Presiden Sosilo Bambang Yudhoyonot? Tujuan tulisan ini untuk memahami kepemimpinan Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, dan Presiden Sosilo Bambang Yudhoyono dalam menggunakan kekuasannya. Kedua untuk memahami variable utama dan situasi yang mendukung kepemimpinan Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam melaksanakan kekuasaannya. Ketiga, menguji konsep kepemimpinan Herbert Feith dan relevansinya dengan kepemimpinan Presiden Soeharto dan presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sistimatika tulisan terdiri dari pendahuluan, penjelasan teori, penjelasan metode penelitian, dan hasil penelitian dan diskusi.

**B. Teori**

1. **Teori Kepemimpinan Politik**

 Tobias van Assche menyatakan, studi kepemimpinan politik pada dasarnya meneliti bagaimana prilaku pemimpin poltik secara individual dapat mempengaruhi proses pembuatan kebijakan dan bagaimana prilaku tersebut dapat mempengaruhi tipe keputusan yang diambil. Tiga komponen personalitas yang mempengaruhi kepemimpinan tokoh dalam membuat keputusan yaitu: (1) motif; (2) kognisi dan keyakinan; (3) sifat. Motif pemimpin untuk bertidak didorong oleh motif: (1) kebutuhan akan kekuasaan; (2) prestasi; (3) afiliasi dengan orang lain. Kognisi dan keyakinan, mencakup bagaimana pemimpin menginterpretasikan, menyusun dan mengambil informasi, serta keyakinan umum pemimpin tentang sifat politik dan dunia pada umumnya. Apakah pemimpin memandang suatu masalah bersifat hitam-putih atau abu-abu. Sifat, berkaitan dengan sifat-sifat pemimpin seperti keramahan, berhati-hati (*conscientiousness*), keterbukaan pada pengalaman baru. Analisis studi kepemimpinan politik dapat juga dilakukan melalui analisis beberapa faktor varibel yang mempengaruhi pemimpin politik dalam membuat keputusan politik. Studi kepemimpinan politik dapat dilakukan pada presiden, perdana menteri, pimpinan organisasi politik seperti Sekjen PBB dan lainnya. [[10]](#footnote-10)

M. Brewster Smith dalam karyanya menjelaskan tentang prilaku pemimpin politik. Studi perilaku politik memiliki dua fokus utama yaitu tipolologi kepribadian pemimpin politik dan faktor yang mempengaruhi prilaku seorang pemimpin politik. Tipologi kepribadian pemimpin politik seperti pemimpin otoriter atau demokrat. Faktor mempengaruhi prilaku politik pemimpin yaitu: (1) lingkungan sistem politik tidak langsung, seperti sistem politik, sistem ekonomi, sistem budaya, dan media massa; (2) lingkungan sosial politik langsung seperti, keluarga, agama, keluarga, dan kelompok.[[11]](#footnote-11)

2. **Studi Kepemimpinan Politik**

James Barber, studinya tentang kepemimpinan presiden Amerika Serikat (AS). Barber dalam studinya membagi katagori presiden AS menjadi pasif atau aktif dalam hal energi yang dicurahkan untuk pekerjaannya, dan positif berdasarkan kepuasannya yang diperoleh dari posisinya. Berdasarkan katagori tersebut dapat muncul gabungan katagori yang melahirkan tipe kepemimpinan presiden, pertama kepemimpinan presiden aktif-negatif. Tipe kepemimpinan ini cenderung kompulsif dan tipe kepemimpinan berbahaya. Tipe kepemimpinan ini melekat pada Presiden Herbert Hoover, Presiden Lyndon Johnson, dan Presiden Nixon. Kedua tipe kepemimpinan presiden aktif -positif, tipe kepemimpinan ini cenderung adaptif dan kepemimpinan yang paling sukses. Tipe kepemimpinan ini melekat pada Presiden Bill Clinton dan Presiden Jimmy Carter.[[12]](#footnote-12)

Rebecca E. Deen, dalam studinya lembaga kepresidenan di Amerika, mengemukakan bahwa beberapa cara yang yang digunakan oleh Presiden menghadapi tekanan kongres yaitu: (1) menggunakan perangkat informal dengan cara melakukan tawar-menawar dengan kongres dari ancaman veto; (2) presiden dapat memerintahkan birokrasinya untuk tidak mengimplementasikan bagian tertentu dari undang-undang yang ditandatanganinya.[[13]](#footnote-13)

Studi prilaku kepemimpinan presiden di Indonesia sudah dimulai semenjak kepemimpina Presiden Soekarno. Herbert Feith,[[14]](#footnote-14) membagi corak kepemimpinan elite politik Indonesia menjadi 2 yaitu administrator dan *solidarity maker*. Sebagaimana dikatakannya:

In discussing the revolutionary period we saw haw the country's situation create conflict between "administrator's", in the sense of leaders with the administrative , tchnical, legal, and foreign- language skills requered to run the distinctively modern apparatus of a modern state , and "slidarity maker", leaders skilled as mediators between groups at different levels of modernity and political effectiveness, as mass organizers, and as manipulators of integrative symbols.”

”Dalam membahas periode revolusioner, kita melihat bagaimana situasi negara menciptakan konflik antara pemimpin "administrator", dalam arti para pemimpin dengan keterampilan administratif, teknis, hukum, dan bahasa asing yang dibutuhkan untuk menjalankan aparatur modern seperti negara modern, dan pemimpin "slidarity maker", pemimpin yang memiliki keterampilan sebagai mediator antar kelompok di berbagai tingkat modernitas dan efektivitas politik, sebagai pengorganisir massa, dan sebagai manipulator simbol-simbol persatuan.”

Albert Widjaja menafsirkan konsep kepemimpinan Herbert Feith. Ciri kepemimpinan elite administrator fokus utama pemerintah yaitu: (a) membangun tehnis administrasi; (b) pelaksanaan hukum; (c) kebijaksanaan membangun negara agar maju. Visi pembangunan pembangunan adalah kebijakan yang berorientasi pemecahan masalah sosial-ekonomi (*problem-solving)*. Corak kepemimimpinan ini melekat pada Wakil Presiden Mohammad Hatta. Ciri kepemimpinan elite *solidarity maker* fokus utama fungsi pemerintah yaitu: (a) membangun kewibawaan pemerintah (*legitimation* ), rakyat harus punya kesan positif dan patuh pada pemerintah; (b) pembangunan pembinaan kesatuan dan persatuan bangsa (*nation building*), karena masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai suku dan agama; (c) pembangunan pembinaan kesatuan dan persatuan bangsa (*nation building*), karena masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai suku dan agama. Visi pembangunan adalah pembinaan bangsa, menekankan fungsi simbolis dan ritualism pemerintah sebagai lambang dan pusat kepemimpinan semua golongan masyarakat, lambang kesatuan, dan pembina tradisi bangsa. Corak kepemimpinan ini melekat pada Presiden Soekarno.[[15]](#footnote-15)

Alber Widjaja, menjelaskan tentang pola kepemimpinan elite Indonesia yaitu kepemimpinan activism dan kepemimpinan legitimasi. Kepemimpinan aktivism memiliki ciri: (1) mendorong orang lain untuk mengambil peran dan tanggungjawab; (2) menumbukan sikap kritis dan bebas bagi pertumbuhan swasta. Kepemimpinan kepatuhan memiliki ciri: (1) mengambil alih tanggungjawab, mengharapkan orang lain ikut saja; (2) mengharap orang lain selalu setuju dengan pemimpin.[[16]](#footnote-16)

Studi lembaga kepresidenan di Indonesia antara lain ditulis Afan Gaffar tentang kekuasaan lembaga kepresiden di Indonesia masa Demokrasi Terpimpin dan Demokrasi Pancasila. Menurut Afan, masa Demokrasi Terpimpin kekuasaan lembaga kepresidenan tidaklah sekuat seperti yang tertulis dalam UUD 1945. Presiden dalam prakteknya harus membagi kekuasaannya dengan Angkatan Darat (AD) dan Partai Komunis Indonesia (PKI). Figur Pesiden Soekarno merupakan seorang pemimpin besar karena sangat berpengaruh, merupakan faktor sejarah yang tidak dapat diabaikan.[[17]](#footnote-17)

 Lembaga kepresidenan dalam pengertian presiden, wakil presiden, kabinet, dan kepala lembaga pemerintahan masa Orde Baru, memiliki sumber daya kekuasaan yang sangat besar, yang dapat dipergunakan untuk memelihara kekuasaan yang sedang dimilikinya, sehingga tidak ada seorangpun atau institusi apapun yang akan mampu bersaing dengan presiden yang sedang memegang jabatan. Sumber kekuasaan Presiden Soeharto yaitu: (1) mengontrol rekruitmen politik; (2) memiliki sumber daya keuangan yang besar. Kontrol rekruitmen politik dimaksud yaitu: (a) rekruitmen lembaga tinggi negara; (b) rekruitmen organisasi politik. Presiden memiliki personal otoritas (Pemegang Supersemar, Bapak Pembangunan), presiden merupakan Panglima Tertinggi.[[18]](#footnote-18)

Sumber keuangan presiden berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Presiden dapat mengimplementasi APBN melalui sejumlah proyek melalui Intruksi Presiden (Inpres) seperti Inpres Pedesaan, Inpres Desa Tertinggal, Inpres Peningkatan jalan, Inpres Kesehatan, Inpres Pendidikan, Inpres Penghijauan. Kebijakan presiden lainnya berupa program Bantuan Presiden (Banpres). Presiden memiliki sumber anggaran non-APBN seperti Yayasan Amal Bhakti Mulim Pancasila untuk membantu membangun Masjid dan Yayasan Supersemar dengan program memberikan beasiswa kepada pelajar dan mahasiswa. Penggunaan keuangan presiden, bertujuan membentuk citra, karena pemerintah yang memiliki uang, dan mempermudah mobilisasi dukungan rakyat.[[19]](#footnote-19)

Mohtar Mas’oed, memusatkan perhatiannya pada proses menguatnya lembaga kepresiden pada masa Orde Baru. Secara teoritik, terdapat beberapa strategi untuk membangun kekuasaan yaitu: strategi yang digunakan untuk membangun kekuasaan bidang politik yaitu: (1) menampilkan citra baik tentang kepribadian pemimpin; (2) membangun organisasi; (3) mengembangkan ideologi; (4) mengganjal pengikut dan menghukum penentang; (5) membangun ekonomi, dan memanfaatkan pembangunan ekonomi untuk memperoleh dukungan rakyat dan memberikan ganjaran kepada mereka yang mendukung pemerintah; (6) memanfaatkan politik politik luar negeri.[[20]](#footnote-20)

Menurut Mohtar Mas’oed, kekuasaan Jenderal Soeharto bersumber dari dua hal yaitu: (1) memanfaatkan dua wewenang khusus yang diperoleh dari Presiden Soekarno; (2) kemampuan membina sumber keuangan sendiri untuk tujuan patronase.[[21]](#footnote-21) Wewenang khusus yang yang diterima Presiden Soeharto yaitu menjadi Panglima Komando Operasi Ketertiban dan Keamanan (Kopkamtib) pada tanggal 2 Oktober 1965, dan Surat Perintah 11 Maret 1965 dari Presiden Soekarno. Bidang politik Presiden Soeharto membuat Dapur- Politik yakni keputusan dibuat melalui proses pertimbangan di antara beberapa perwira senior, diantaranya, Mayor Jenderal Sutjipto, Mayor Jenderal Basuki Rachmat, Jenderal Alamsyah, Jenderal Yoga Sugama, Soerdjono Humardani, dan Ali Murtopo.

Presiden Soeharto menggali sumber keuangan berasal dari anggaran non-budgeter yaitu: (1) Badan Logistik (Bulog); (2) Pertamina; (3) sumber swasta yang dipungut dari pajak kegiatan ekspor kayu, kopra, karet, dan kopi; (4) pengusaha yang diberi hak monopoli. Dana-dana tersebut untuk program-program yang dirancang untuk membina konstituen atau pendukung di kalangan kekuatan politik non-pemerintah.[[22]](#footnote-22)

Karya Afan Gaffar dam Mohtar Maso’ed menggunakan pendekatan strategi presiden membangun kekuasaa, dengan pertanyaan mengapa kedua presiden tersebut bisa berkuasa dalam jangka waktu yang lama, tanpa ada satu institusipun yang mampu mengawasi kekuasaannya.

Herberth Feith dan Albert Widjaja melihat kepemimpinan politik dengan pendekatan persoaliti pemimpin dalam membuat keputusan, keduanya melahirkan kepemimpinan apa yang disebut pemimpin solidarity maker/pemimpin legitimasi dan pemimpin administrator/aktivsim.Persoalannya faktor yang mempengaruhi kepemimpinan tersebut dan kepemimpinan mana yang sesuai mendukung demokrasi?

Studi tentang kekuasan lembaga Presiden di Indonesia pasca-Orde Baru khususnya masa jabatan Presiden Abdurrahman Wahid, ditulis oleh Vedi Hadiz. Menurutnya, kemunculan Abdurrahman Wahid sebagai presiden merupakan hasil kompromi politik antara elite-elite partai politik untuk membangun koalisi berdasarkan kepentingan bersama. Kepentingan dimaksud adalah untuk mengamankan kepentingan elite-elite partai dengan jalan saling menjamin berbagi akses harta negara. Kepentingan lainnya adalah meredam gerakan massa untuk melaksanakan reformasi sistem politik Indonesia. Elite-elite partai merasa khawatir, kemenangan Megawati Soekanoputri akan memancing rekasi dari kalangan organisasi Islam. [[23]](#footnote-23)

Wujud kompromi dari elite-elite partai politik setelah Abdurahman Wahid terpilih menjadi Presdien adalah Megawati Soekarnoputri (PDIP) memperoleh kursi Wakil Presiden, Amin Rais (PAN) memperoleh kursi Ketua MPR, dan Akbar Tandjung (Partai Golkar) memperoleh kursi sebagai ketua DPR. Presiden Abdurrahman Wahid juga mengangkat sejumlah menteri mewakili partai politik. Fakta lainnya adalah menteri Kabinet mencerminkan perwakilan partai pendukung sesuai dengan prosentasi jumlah kursi DPR. [[24]](#footnote-24)

Pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid elite-elite partai karena presiden terlibat dalam kasus *bruneigate* dan *buloggat*e, alasan tersebut bukan merupakan alasan sesungguhnya. Pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid terjadinya disebabkan persaingan antara elite-elite partai memperebutkan kontrol terhadap lembaga negara beserta seluruh sumber dayanya. Ketika Presiden Abdurahman Wahid terpilih menjadi Presiden, pemerintahannya sudah diwarnai perseteruan antara menteri kabunet memperebutkan kontrol terhadap Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), sebuah institusi yang mengendalikan aset swasta yang dikendalikan negara dengan nilai 600 teriliun rupiah. Persaingan itu juga tercermin dalam perebutan kontrol atas sejumlah perusahaan negara. Fakta lainnya adalah ketua Umum Partai Golkar Akbar Tandjung juga terlibat menggunakan dana Bulog untuk kepentingan Pemilu. [[25]](#footnote-25) Apa yang dikemukakan Vedi R. Hadiz pada dasarnya menjelaskan varibel lingkungan domestik terutama tekanan elite partai mempengaruhi lemahnya kekuasaan presiden. Model penjelasan studi kekuasaan presiden tersebut di atas, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Studi Kekuasaan Presiden:

1.Kepemimpinan Presiden (Otoriter vs Demokrat, Aktif-Negatif vs Aktif-positif, Solidarity Maker vs Administrator, Aktivism vs legitimasi )

2.Strategi Presiden: Politik dan Ekonomi

Lingkungan Sosial Politik Tidak Langsung(sistem politik, sistem Ekonomi, Sistem Budaya, dan media MassaSistem Budaya

Lingkungan Sosial Langsung (keluarga, Agama, Keluarga, dan Teman Pergaulan)

**C. Metode Penelitian**

Penelitian ini menngunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bercirikan induktif atau menjelaskan fenomena politik.[[26]](#footnote-26) Kedua, penelitian ini tanpa bertujuan menguji hipotesis. Ketiga, penelitian ini tidak menggunakan prosedur analisis statistik. Penelitian yang berusaha menggambarkan realitas sosial politik yang kompleks melalui penyederhanaan dan klasifikasi dengan memanfaatkan konsep-konsep yang bisa menjelaskan suatu gejala sosial politik secara analitis.[[27]](#footnote-27) Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka, yakni sejumlah informasi dan data yang diperlukan diperoleh melalui penelusuran terhadap sumber-sumber tertulis berupa data-data yang bersumber dari dokumen, buku-buku, disertasi, tesis, jurnal, majalah, koran dan media internet. Analisis data penelitian ini dilaksanakan dalam empat tahap yaitu tahap pengecekan data, tahap pengkatagorian data dan tahap penafsiran data, dan tahap kesimpulan. *Pertama*, tahap pengecekan data. Pengecekan data dalam penelitian ini menggunakan tehnik triangulasi, adalah tehnik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Tehnik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah setelah data diperoleh melalui kepustakaan dilakukan pengecekan satu sama lainnya. Misalnya data tulisan di jurnal atau akan dicek dengan data-data dokumen. *Kedua,* tahap pengkatagorian atau pengklafikasian data. Dalam tahap ini data-data yang sudah dicek, kemudian diklasifikasi atau dikatagori menurut urutan pembahasan dalam penelitian *Ketiga,* tahap penafsiran data. Pada tahap ini dilakukan penafsiran atau pemberian makna yang signifikan terhadap data yang diklasifikasi dan dicari hubungannya satu sama lain. *Keempat*, tahap pengambilan kesimpulan dan implikasi teori. Pada tahap ini dilakukan pengambilan kesimpulan terhadap data dan fenomena yang sudah disusun untuk menjawab pertanyaan penelitian.

**D. Hasil Penelitian dan Diskusi**

1. **Kepemipinan Presiden Soekarno (1945-1967)**

Presiden Soekarno diangkat menjadi presiden berdasarkan keputusan Panitian Kemerdekaan Republik Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945, menetapkan Sokarno dan Mohammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI. Kabinet pertama Presiden Soekarno bernama kabinet presidensial, jumlah menteri kabinet sebanyak 19 orang.[[28]](#footnote-28)

Perkembangan selanjutnya terjadi perubahan, kekuasaan presiden hanya sebatas kepala negara dan simbol negara, kekuasaan pemerintahan berada di bawah kekuasaan perdana menteri. Perubahan ini terjadi berdasarkan Maklumat No. X Tahun 1945 pada tanggal 16 Oktober 1945 yang di tandatangani oleh Wakil Presiden Mohammd Hatta. Isi Maklumat tersebut menyatakan “Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-Undang Dasar ini, segala kekuasaan dijalankan Presiden dengan bantuan sebuah Komite Nasional”. Berdarkan Maklumat tersebut, pada tanggal 22 Agustus 1945, Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) terbentuk.

Badan Pekerja KNIP (BPKNIP) pada tanggal 11 November 1945 mengusulkan kepada Presiden Sukarno agar kabinet bertanggung jawab kepada parlemen. Presiden Soekarno menerima usulan BPKNIP, kemudian Presiden Soekarno pada tanggal 14 November 1945 membubarkan kabinetnya dan sekaligus menjadi perdana menteri. Kebijakan tersebut membawa terjdi perubahan dalam sistem pemerintahan Indonesia dari sistem presidensial menjadi sistem parlementer. Sistem parlementer yang baru ini, kekuasaan presiden hanya bersifat simbolik, kekuasaan berada ditangan perdana menteri dan para menteri kabinet bertanggung jawab kepada DPR. Hal ini berlangsung sampai dengan keluarnya Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959.

Kebijakan ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan kekuatan-kekuatan politik yang ada. Pihak yang menolak berpandangan bahwa, kebijakan tersebut bertentangan dengan UUD 1945. Berdasarkan UUD 1945, sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan sistem Presidensial. Kelompok yang menyetujui beralasan bahwa perubahan dalam sistem kabinet suatu pemerintahan merupakan hal yang biasa dan dapat dibenarkan. Kebijakan perubahan sistem pemerintahan semacam ini pernah terjadi dalam tata negara di Inggris.[[29]](#footnote-29) Sikap pemerintah dan BPKNIP tetap melakukan perubahan dalam sistem pemerintahan, tanpa amandemen UUD 1945, dengan alasan dalam rangka menampung aspirasi berbagai kekuatan politik yang ada di Indonesia.

Kabinet-kabinet pada Demokrasi Parlementer yang berlangsung dari tahun 1949-1959 dapat dilihat pada tabel di bawah.

**Tabel 1. Kabinet Masa Demokrasi Parlementer[[30]](#footnote-30)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nama Kabinet** | **Jumlah Menteri** | **Dibentuk** | **Demisioner** |
| Kabinet Sjahrir I | 16 | 1945 | 1946 |
| Kabinet Sjahrir II | 24 | 1946 | 1946 |
| Kabinet Sjahrir III | 31 | 1946 | 1947 |
| Kabinet Amir Sjarifuddin I | 31 | 1947 | 1947 |
| Kabinet Amir Sjarifuddin II | 32 | 1947 | 1948 |
| Darurat | 11 | 1948 | 1949 |
| Kabinet Hatta I | 16 | 1948 | 1949 |
| Kabinet Hatta II | 17 | 1949 | 1949 |
| Kabinet RIS | 16 | 1949 | 1950 |
| Kabinet Susanto | 9 | 1949 | 1950 |
| Kabinet Halim | 13 | 1950 | 1950 |
| Kabinet Natsir | 16 | 1950 | 1951 |
| Kabinet Sukiman-Suwiryo | 17 | 1951 | 1952 |
| Kabinet Wilopo | 16 | 1952 | 1953 |
| Kabinet Sastromijojo I | 17 | 1953 | 1955 |
| Kabinet Burhanuddin Harahap | 20 | 1955 | 1956 |
| **Kabinet Sastromijojo II** | **22** | **1956** | **1957** |
| **Kabinet Djuanda** | **26** | **1957** | **1959** |

Presiden Soekarno menjadi Presiden RI, setelah mengeluarkan sebuah Dekrit pada tanggal 5 Juli 1959. Isi Dekrit Presiden yaitu: (1) menetapkan pembubaran Konstituante; (2) menetapkan berlakunya Undang-Undang Dasar (UUD) 1945; (3) membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) yang terdiri atas anggota-anggota DPR ditambah utusan golongan dan daerah; (4) membentuk Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS). Dekrit Presiden ini sebagai solusi atas krisis politik yang terjadi. Dekrit Presiden merupakan dasar berlakunya kembali sistem presidensial dengan Presiden Soekarno sebagai kepala negara dan sebagai Presiden Indonesia.

Pembahasan tentang alasan Presiden Soekano menggunakan konsep demokrasi terpimpin adalah rakyat dalam melaksanakan kewajibannya arus sejalan dengan presiden. Alasan Presiden Soekarno, demokrasi parlementer tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, dan dapat menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Presiden Soekarno dalam gagasannya tentang demokrasi terpimpin menghendaki kapatuhan rakyat pada pemimpindan mengutamakan rasa persatuan. Merujuk pada konsep Herbert Feith tentang gaya kepemimpin Presiden Soekarno termasuk presiden yang memiliki gaya kepemimpinan solidarity maker. Wakil Presiden Muhammad Hatta dalam konsep Herbert Feith termasuk pemimpin bergaya administrator, karena mementingkan aspek demokrasi dan pembangunan ekonomi yang rasional. Konsep kepemimpinan Albert Widjaja, Muhammad Hata temasuk pemimpin bergaya aktivism.

Presiden Soekarno semenjak tahun 1959, telah membentuk 8 kali perombakan cabinet, datanya dapat dilihat pada Tabel 2.

**Tabel 2. Kabinet Presiden Soekarno 1959-1966**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nama Kabinet** | **Jumlah Menteri** | **Dibentuk** | **Demisioner** |
| Kabinet Kerja I | 32 | 1959 | 1960 |
| Kabinet Kerja II | 39 | 1960 | 1962 |
| Kabinet Kerja III | 56 | 1962 | 1963 |
| Kabinet Kerja IV | 61 | 1963 | 1964 |
| Kabinet Dwikora I | 104 | 1964 | 1966 |
| Kabinet Dwikora II | 99 | 1966 | 1966 |
| Kabinet Dwikora III | 35 | 1966 | 1966 |
| Kabiniet Ampera I | 28 | 1966 | 1967 |

 Sumber Olahan: perpusnas.co.id, diunduh tanggal 27 Maret 2020.

Bidang kepartaian, Presiden Soekarno melakasanakan penyederhanan sistem kepartaian melalui Penpres No. 7 Tahun 1959 tentang Syarat-Syarat dan Penyederhanaan Kepartaian. Partai-partai yang dianggap memenuhi persyaratan yaitu PNI, NU, PKI, Parkindo, Partai katolik, PSII, Perti, Murba, IPKI dan Partindo. Partai Masyumi dan PSI sebelumnya sudah dibubarkan oleh Presiden Soekarno. Alasannya adalah tokoh-tokoh kedua partai tersebut terlibat mendukungan gerakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI).

Presiden Soekarno menganggap partai politik pada masa Demokrasi Parlementer, terlalu banyak dan harus disederhanakan dan disehatkan. Alasan Presiden Soekarno adalah dalam sejarah Republik Indonesia, Indonesia tidak pernah mencapai kewibawaan dan kestabilan pemerintahan karena adanya model oposisi dalam parlemen. Presiden Soekarno mengemukakan tidak menentang demokrasi, malahan menuju demokrasi yang sebenarnya, yakni demokrasi gotong royong seperti yang terdapat dalam masyarakat Indonesia yang asli. Presiden Soekarno menolak demokrasi model negara-negara di Barat berdasarkan kebebasan. Akibatnya adalah menimbulkan konflik yang berkepanjangan, sehingga usaha-usaha untuk melaksanakan pembangunan menjadi terabaikan. Presiden Soekarno berpandangan partai politik di Indonesia perlu disederhanakan menjadi beberapa partai atau satu partai.[[31]](#footnote-31)

Bidang legislatif, Presiden Soekarno membubarkan DPR hasil Pemilu 1955 melalui Penetapan Presiden (Penpres) No. 3 Tahun 1960 pada tanggal 5 Maret 1960. Penyebabnya adalah perbedaan pendapat antara pemerintah dengan DPR mengenai Penetapan Anggaran Belanja Negara tahun 1960. Pemerintah mengusulkan kepada DPR pengeluaran pemerintah sebesar 44 milyar rupiah, usaha untuk mengatasi kekuarangan penerimaan akan diambil dengan menaikkan pajak. DPR menetapkan pengeluaran sebesar 39 milyar rupiah dan menolak menaikkan pajak. Penyebab lainnya adalah DPR dalam melaksanakan tugasnya tidak memenuhi harapan Presiden Soekarno supaya bekerja atau membantu kebijakan-kebijakan Presiden. Kerjasama antara pemerintah dan DPR tidak memenuhi harapan tersebut disebabkan susunan DPR berdasarkan UUDS 1950 tidak mendukung kebiajakan-kebijakan Presiden sehingga danggap mengambat lancarnya pembangunan.[[32]](#footnote-32)

Presiden Soekarno membentuk Dewan Perwakilan Rakyat-Gotong Royong (DPR-GR) berdasarkan Penpres No. 4 Tahun 1960 pada tanggal 24 Juni 1960, kemudian mengangkat anggota-anggota DPR-GR berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres) No. 156 Tahun 1960 berjumlah 283 orang. Anggota-anggota DPR-GR berasal dari parta politik yaitu PNI, NU, PKI, Parkindo, Partai katolik, PSII, Perti, Murba, dan Partindo, berjumlah 130 orang. Golongan Karya (ABRI, Tani, Buruh, Alim Ulama, Angkatan 1945, Cendikiawan, Koerasi, Pengusaha Nasional, Veteran, Seniman, dan Wartawan) berjumlah 152 orang dan satu wakil dari Irian Barat.[[33]](#footnote-33).Pada masa ini Presiden Soekarno mengangkat para pimpinan DPR-GR sebagai Menteri Negara.Ketua DPR-GR diberi kedudukan sebagai Menteri Kordinator (Menko) dan wakil Ketua DPR berkedudukan sebagai Menteri.[[34]](#footnote-34)

Presiden Soekarno. membentuk Peraturan Presiden (Perpres) No. 14 Tahun 1960 tentang Tatib DPR-GR. Tatata tertib DPR-GR diatur, Presiden memiliki kekuasaan untuk mengambil keputusan, apabila kata mufakat tidak tercapai di internal DPR-GR. Kewenangan Presiden ini sebagaimana terdapat pada Perpres asal 103 yang menyatakan:(1) Keputusan sedapat mungkin dilakukan dengan kata mufakat;(2) Jika Kata mufakat termaksud dalam Ayat (1) pasal ini tidak tercapai, maka pendapat-pendapat yang dikemukakan dalam musyawarah disampaikan kepada Presiden; (3)Presiden mengambil keputusan dengan memperhatikan pendapat-pendapat termaksud pada Ayat (2) pasal ini.

Presiden Soekarno membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) berdasarkan Penpres No. 2 Tahun 1959. Keanggotaan MPRS ditetapkan berdasarkan Perpres No. 12 Tahun 1959. Rekrutmen anggota-anggota MPRS melalui mekanisme pengangkatan oleh Presiden Soekarno. Anggota MPRS berjumlah 603 orang terdiri dari anggota DPR-GR sebanyak 283 orang, Utusan daerah sebanyak 94 orang, wakil Gologan Karya sebanyak 232 orang. Presiden Soekarno memberi predikat pimpinan MPRS sebagai menteri.[[35]](#footnote-35)

Bidang yudikatif, Presiden Soekarno memberikan status Menteri kepada Ketua Mahkamah Agung (MA). Presiden Soekarno memiliki kewenangan untuk mencapuri keputusan-keputusan pengadilan. Kewenangan Presiden ini diatur melalui Undang-Undang No. 19 Tahun 1964 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU No. 19 Tahun 1964). Pasal 19 UU No 19 tahun 1964 dimaksud menyatakan” Demi kepentingan revolusi, kehormatan negara dan bangsa atau kepentingan masyarakat yang mendesak, presiden dapat turut atau campur tangan dalam soal pengadilan.” Hal ini diperkuat dengan penjelasan umum dalam undang-undang tersebut yang menyatakan: “Trias politika tidak mempunyai tempat sama sekali dalam Hukum Nasional Indonesia.

Kebijakan Presiden Soekarno dalam menyelenggarakan kekuasaan mengendalikan peran partai politik, peran DPR, peran MPR, dan mengatur peran kekuasaan Mahkamah Agung. hendak menegakkan kewibawaan pemerintah. Kebijakan-kebijakan tersebut memperlihatkan, Presiden Soekarno dalam menjalankan kekuasaannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dapat dimasukan ke dalam persiden yang memiliki gaya kepemimpinan legitimasi dalam konsep Albert Widjaya, karena menghendaki lembaga-lembaga negara ikut saja keinginan pemimpin, atau konsep kepemimpinan solidarity maker dalam konsep Herbert Feith, Presiden Soekarno mengutamakan persatuan dan mengedepankan simbolis.

Kepemimpinan Presiden Soekarno bersifat demokratis-responsif Ketika merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Presiden Soekarno dalam gagasan Presiden Soekarno, sila persatuan Indonesia ditempatkan pada sila pertama, dikuti sila kerakyatan dan sila ketuhanan pada bagian akhir. Setelah melalui musyawarah dengan anggota PPKI, Presiden Soekarno menyetujui sila ketuhan yang maha esa menjadi sila pertama, kemudian ditetapkan menjadi dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Situasi perubahan kepemimpinan Soekarno cenderung demokratis-adaptif, ketika memberikan laporan pertanggunjawaban kepada MPRS. Perubahan sikap in terjadi, karena kuatnya tekanan masyarakat yang dimotori mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) yang menuntut Presiden Soekarno diadili atas terjadinya kasus pembunuhan dalam kasus G.30. S/PKI. Tekanan kepada Presiden Soekarno ini didukung oleh situasi krisis ekonomi yang dihadapi Indonesia.

Faktor utama yang mempengaruhi kepemimpinan Presiden Soekarno bergaya solidarity maker adalah faktor budaya dan faktor latar belakang situasi politik. Presiden Soekarno merupakan Masyarakat Jawa yang memiliki budaya kekuasan. Faktor latar belakang politik berkaitan situasi yang berkembang semasa demokrasi parlementer.

Tradisi Jawa berkaitan dengan konsep *kawula-gusti* atau hubungan raja dan kaula atau rakyat. Konsep ini tidak hanya menunjukkan hubungan yang tinggi dengan yang rendah, tapi lebih menunjukkan saling tergantung yang erat antara unsur yang berbeda namun tak terpisahkan, dua unsur dari hal yang sama.[[36]](#footnote-36) Pemikiran Jawa tentang hubungan raja dengan kaulanya meliputi tiga konsep pokok yaitu: (1) hubungan pribadi yang akrab yang disertai oleh perasaan saling mengasihi dan menghormati dianggap sebagai pola atau model baku dalam komunikasi sosial. (2) Takdir menetapkan kedudukan manusia dalam masyarakat apakah ia dilahirkan sebagai abdi atau tuan. Akibatnya ialah manusia tidak punya pilihan lain kecuali melakukan kewajibannya seperti yang telah ditentukan oleh takdir. Kedua faktor ini menghasilkan suatu jenis praktek pemerintahan. (3) dalam praktek pemerintahan, penguasa dan para pejabatnya, dari segi kebijaksanaan pemerintahan praktis, harus memperhatikan para warganya seperti seorang orang tua mengasuh anak-anaknya. Dengan demikian sesungguhnya sang penguasa memiliki sikap keunggulan yang melindungi, sedangkan yang diperintah memiliki sikap pengabdian yang tulus.[[37]](#footnote-37) Tradisi nilai budaya Masyarakat Jawa ini terlihat dalam gagasan Presiden Soekarno tentang konsep Demokrasi Terpimpin. Presiden Soekarno menerangkan konsep Demokrasi Terpimpin dengan analogi suatu konser musik:

“…satu konser mempunyai seorang dirigen, yang konsernya terdiri dari banyak orang. Yang satu memegang biola, yang satu memegang gitar, yang satu memegang rombone, yang satu memegang trompet, yang satu memegang ting-ting, yang satu memegang jidor, dan lainnya. Meskipun bermacam-macam alat, tapi oleh karena ada pimpinan, pertama pimpinan dari pada satu lembaran kertas, apa namanya noot, bahasa Indonesianya not. Misalnya lagu Blaue Donau oleh Johann Strauss, sudah nyata lagunya itu dari not ini. Kemudian dirigen sebagai pemimpin yang memimpin orkes itu yang terdiri dari pada puluhan bahkan ratusan orang, keluarlah satu suara yang merdu yang berirama, dan harmonis. Kertas not ini di dalam Demokrasi Terpimpin inilah *blue-print*. Dalam kehidupan negara disebutnya pola pembangunan yang dibuat oleh Dewan Perancang Nasional, disingkat DPN. Penyelenggara pola ini masyarakat yang terdiri dari tenaga-tenaga fungsional, menyelenggarakan pola ini bersama-sama di dalam satu irama yang merdu sehingga terselenggaralah masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, sebagai mana tertulis di dalam Undang-Undang pembentukan DPN. Bertindak sebagai pemimpin atau dirigennya yang mengatur semua irama tersebut tidak harus bernama Soekarno, bisa juga yang lain.”[[38]](#footnote-38)

Konsepsi Demokrasi Terpimpin dapat dilacak dari berbagai ide dan pemikiran Presiden Soekarno. Karena ide dasar konsep Demokrasi Terpimpin berasal dari pemikirannya. Menurut Presiden Soekarno.

“Sila Kedaulatan rakyat adalah tehnis kedaulatan rakyat atau dalam bahasa asing *democratie*. Demokrasi dalam pengertian sekedar satu alat untuk mencapai suatu tujuan. Teknis tujuannya ialah suatu masyarakat yang berbentuk suatu hal. Jikalau tujuan sudah ditentukan, maka salah satu alat untuk mencapai masyarakat itu adalah demokrasi. Untuk mencapai masyarakat yang didam-idamkan bukan hanya demokrasi, tapi ada nasional sosialisme, dan lainnya. Demokrasi yang akan dijalankan di Indonesia bukan

demokrasi dari Eropa Barat atau dari Amerika. Demokrasi Indonesia adalah Demokrasi Tepimpin.[[39]](#footnote-39) (Sukarno, 1984; 91)

“Demokrasi adalah suatu ideologi politik dari pada salah satu periode, satu bukti bahwa kesadaran manusia, sebab demokrasi adalah satu alam pikiran, alam pikiran politik, bahwa alam pikiran ini adalah terbuat oleh suatu cara produksi di dalam suatu periode. Artinya, bahwa dalam suatu periode yang cara produksinya belum membutuhkan *parlementaire democratie,* belum timbul pemikiran *parlementaire democratie* itu. Orang belum membutuhkan demokrasi-demokrasian, orang senang dengan cara feodal yang tidak ada parlemen-parlemen. Cuma *sabda pandita ratu* terserah kepada raja, raja yang membuat hukum, raja yang menentukan sesuatu. Masyarakat ketika itu semuanya tergantung kepada raja. Oleh karena itu demokrasi yang kita jalankan adalah demokrasi Indonesia, membawa kepribadian Indonesia sendiri. Demokrasi bagi Indonesia bukan sekedar alat teknis, tapi suatu alam jiwa pemikiran dan perasaan Bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia harus bisa meletakkan alam jiwa dan pemikiran bangsa kita itu di atas kepribadian bangsa sendiri, di atas penyelenggaraan cita-cita satu masyarakat yang adil dan makmur yang sudah jelas tidak bisa dengan demokrasi cara ini. Oleh karena itu Demokrasi Indonesia yang akan dijalankan adalah Demokrasi Terpimpin.[[40]](#footnote-40)

Presiden Soekarno mengemukakan dua prinsip pokok dalam membangun Demokrasi Terpimpin dalam kehidupan politik yaitu, pertama, mengenai masalah kabinet yang dinamakan kabinet gotong-royong. Kedua, Dewan Nasional. Kabinet Gotong-royong merupakan kabinet yang duduk daripada semua-fraksi-fraksi atau parai-partai di dalam parlemen hendaknya duduk di dalam parlemen. Semua partai dan fraksi yang ada di parlemen apakah dia Masyumi, PKI, NU, PNI, PKI, Katolik dan semua partai kecil sekalipun yang ada dalam parlemen diberi hak duduk dalam kabinet untuk menjadi mentri Kabinet untuk mendukung pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden. Menurut Soekarno dengan kabinet gotong-royong yang demikian, maka hilanglah apa yang dinamakan oposisi yang sudah berjalan selama masa demokrasi parlementer. Dengan bentuk kabinet yang seperti itu, musyawarah dengan kekeluargaan dapat berjalan dengan suasana gotong -royong, dengan sendirinya oposisi yang pernah ada sebelumnya akan lenyap dengan sendirinya. Menurut Soekarno perbedaan pendapat sesuatu yang wajar, akan tetapi tidak berarti berusaha menjatuhkan kabinet.[[41]](#footnote-41)

Dewan Nasional adalah suatu badan yang di dalamnya meliputi segenap bangsa Indonesia dengan tiada memandang dari mana asal golongan itu. Dewan Nasional ini anggota-anggotanya terutama sekali ialah wakil atau orang-orang pada golongan fungsional dalam masyarakat Indonesia yaitu, gelongan cendikiawan, golongan pengusaha, wakil golongan katolik, wakil golongan protestan, wakil golongan ulama, wakil golongan wanita, wakil golongan yang mempersoalkan masalah daerah, Kepala staf Angkatan Darat, Kepala staf Angkatan Udara, Kepala Staf , Jaksa Agung, beberapa Menteri yang penting, Angkatan Laut, Dan kepala Kepolisisan dan Dewan Nasional ini akan dipimpin langsung oleh Presiden. Fungsi Dewan Nasional adalah memberi nasehat kepada kabinet, nasehat yang diminta atau tidak diminta, oleh karena dewan nasional ini tersusun dari orang-orang atau wakil-wakil atau golongan-golongan yang fungsional di dalam masyarakat. Sebagai kabinet adalah pencerminan dari pada parlemen, parlemen laksana diperas menjadi kabinet, Dewan Nasional dan kabinet berdiri berdampingan di dalam kabinet. Dewan Nasional dipimpin oleh Presiden.[[42]](#footnote-42)

Ungkapan Presiden Soekarno tersebut mengisyaratkan tentang lingkungan politik yang mempengaruhi kepemimpinannya yakni Demokrasi Parlementer yang berlangsung di Indonesia tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Demokrasi yang berlangsung pada masa Demokrasi Parlementer adalah demokrasi negara asing. Praktek politik yang berlangsung selama Demokrasi Parlementer menimbulkan konflik antar elite-elite partai, tercermin silih gantinya kabinet pada masa itu. Konsekwensi pembangunan yang berkelanjutan menjadi terhambat. Faktor yang lebih kuat adalah faktor budaya Masyarakat Jawa yang melekat pada diri Presiden Soekarno.

Presiden Soekarno tetap jalan dengan sejumlah gagasannya, meskipun respon datang Mohammad Hatta dan reaksi dari pihak lainnya, hal ini membuktikan Presiden Soekarno kurang respon dengan peikiran dan gagasan dari luar dirinya.

1. **Kepemimpinan Presiden Soeharto (1967-1998)**

MPRS menetapkan Jenderal Soeharto sebagai presiden melalui Tap MPRS No. XLIV tahun 1968 yang menyatakan “Mengangkat Jenderal Soeharto, Pengemban Tap MPRS No. IX/MPRS/1966 sebagai Presiden Republik Indonesia hingga terpilihnya Presiden oleh MPR hasil Pemilu”.

Presiden Soeharto semenjak menjadi Presiden RI dari tahun 1967, membentuk sejumlah kabinet yaitu Kabinet Ampera II tahun 1967, Kabinet Kabinet Pebangunan I, Kabinet Pembangunan II yang terbentuk setelah Pemilu 1971, Kabinet Pembangunan III terbentuk setelah Pemilu 1977, Kabinet Pembangunan IV terbentu setelah Pemilu 1982, Kabinet Pembngunan V terbentuk setelah Pemilu 1987, dan Kabinet Pembangunan VI dibentuk setelah Pemilu 1992. Kabinet Pembangunan VII dibentuk setelah Pemilu 1997, yang terakhir ini hanya berumur 1 (satu) tahun karena Presiden Soeharto lengser dari jabatannya, akibat tekanan kelompok reformasi.

**Tabel 3. Kabinet Presiden Soeharto 1967-1998**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nama Kabinet** | **Jumlah Menteri** | **Dibentuk** | **Demisioner** |
| Kabinet Ampera II | 24 | 1967 | 1968 |
| Kabinet Pembangunan I | 24 | 1968 | 1973 |
| Kabinet Pembangunan II | 24 | 1973 | 1978 |
| Kabinet Pembangunan III | 32 | 1978 | 1982 |
| Kabinet Pembangunan IV | 42 | 1982 | 1987 |
| Kabinet Pembangunan V | 44 | 1987 | 1992 |
| Kabinet Pembangunan VI | 43 | 1992 | 1997 |
| Kabinet Pembangunan VII | 38 | 1997 | 1998 |

Kepemimpinan Presiden Soeharto mengendalikan partai politik dengan melakukan penataan terhadap partai politik. Penataan partai politik diawali dengan membubarkan PKI dan Partindo. PKI dianggap terlibat dalam peristiwa G30S/PKI dan Pertindo dianggap ikut mendukungnya. Pada Pemilu tahun 1971 terdapat 10 partai politik yang ikut sebagai peserta Pemilu, yaitu Sekber Golkar (partai pemerintah), NU, Parmusi, PNI, PSII, Parkindo, Partai katolik, Perti, IPKI dan Murba. Partai memperoleh kursi di DPR hanya 2 yaitu IPKI dan Murba.

Pengendalian partai politik terus berlanjut, pada tahun 1975 melalui Undang-Undang No. 3 Tahun 1975 terntang Partai Politik dan Golongan Karya (UU No. 3/1975). Partai politik pada tahun 1973 mengalami penggabungan dari beberapa partai menjadi satu, yang dikenal dengan istilah fusi partai politik. Partai politik yang ada difusikan menjadi 3 partai politik yaitu Golongan Karya (Golkar), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Golkar merupakan gabungan golongan fungsional dan menjadi partai pemerintah. PPP bmerupakan gabungan partai NU, Parmusi, PSII dan Perti disebut kelompok Persatuan Pembangunan atau partai-partai spritual-materialis. PDI merupakan gabungan PNI, IPKI, Murba, Parkindo dan Partai katolik disebut kelompok Demokrasi Pembangunan atau materialis-spritualis. Kemudian hasil fusi partai ini kelompok partai Islam bernama Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai nasionalis dan partai agama non-Islam bernama Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Pengaturan partai politik ini di tuangkan dalam UU No 3/1975.

Pada Pemilu 1971 Jumlah partai politik yang ikut sebagai peserta Pemilu berjumlah 10 partai politik yaitu Golkar, PNI, Parmusi, NU, Parkindo, Partai Katolik, IPKI, Murba, PSII, Perti. Partai politik yang ada, dapat dikelompokkan berdasarkan ideologi. Partai Nasionalis terwakili pada PNI, Murba, IPKI. Partai politik berideologi nasionalis-moderat diwakili Golkar, partai politik Islamis-modernis diwakili Parmusi, partai berideologi Islamis-konservatif diwakili NU, Perti, dan PSII. Partai non-Islam diwakili Parkindo dan partai Katolik.

Kewenanga pembubaran partai politik pada masa Demokrasi Pancasila, bukan merupakan kekuasaan rakyat melalui Pemilu, kekuasaan pembubaran partai beralih kepada Presiden, sebagaimana tertuang dalam UU No. 3/1975 Pasal 14 ayat (1) yang menyatakan “Dengan kewenangan yang ada padanya, Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat dapat membekukan Pengurus Tingkat Pusat Partai Politik atau Golongan Karya yang ternyata melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan Pasal 2, Pasal 7 a dan Undang-undang ini.”

Partai politik pada masa ini hanya memiliki pengurus sampai tingkat Kabupaten/Kota. Kebijakan ini tercantum dalam UU No3/1975 Pasal 10 Ayat (1) dan (2). Ayat (1) menyatakan “Partai Politik dan Golongan Karya mempunyai kepengurusan di : a. Ibukota Negara Republik Indonesia untuk Tingkat Pusat; b.Ibukota Propinsi untuk Daerah Tingkat I; c.Ibukota Kabupaten/Kotamadya untuk Daerah Tingkat II; di tiap kota Kecamatan dan Desa ada/dapat ditetapkan seorang Komisaris sebagai pelaksana Pengurus Daerah Tingkat II. Komisaris dibantu oleh beberapa pembantu.” Ayat (2) menyatakan “Kepengurusan untuk Daerah

Administratif di lingkungan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya dan lainnya dipersamakan dengan Daerah Tingkat II sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini.” Kebijakan Presiden Soeharto ini dikenal dengan istilah massa mengambang (*floating mass*). Kebijakan ini memotong hubungan partai politik dengan massa pendukung partai politik di pedesaan. Partai politik pada masa Pemilu sebelumnya memiliki basis massa di daerah pedesaan. Kebijakan ini sangat memberikan keuntungan pada Golkar, partai ini memiliki jaringan birokrasi sampai ke Desa. Pengalaman menunjukkan Golkar memanfaatkan Lurah/Kepala Desa untuk memobilisasi masyarakat pedesaan untuk memilih Golkar pada setiap Pemilu.

Presiden Soeharto melanjutkan pengendalian partai politik, pada tahun 1985, partai politik ini memiliki ideologi yang sama yakni Pancasila, yang dikenal dengan istilah asas tunggal partai. Asas tunggal partai pada masa ini tercantum dalam Undang-Undang No 3 Tahun 1985 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya (UU No 3/1985) Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2). Ayat (1) menyatakan “Partai Politik dan Golongan Karya berasaskan Pancasila sebagai satu-satunya asas. Ayat (2) menyatakan “Asas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.” Ideologi partai politik yang tersisa adalah nasionalis-moderat, karena partai politik memili asas yang sama. Kondisi partai politik pada masa Demokrasi Pancasila kehilangan identitasnya yang memiliki ragam ideologi.

Pemerintah dalam prakteknya mengintervensi terutama PPP dan PDI selalu mengalami intervensi dari pemerintah pada setiap Musyawarah Nasional (Munas) yang dilaksanakan kedua partai tersebut. izin pelaksanaan Munas akan dikeluarkan oleh Panglima Daerah Militer (Pangdam) apabila calon-calon yang akan muncul dipastikan bukan tokoh yang kritis terhadap pemeritah. Ketua partai PPP dan PDI yang muncul pada masa Munas partai adalah tokoh yang selalu memperoleh restu dari Presiden Soeharto.Intervensi pemerintah ini biasanya melalui jaringan ABRI

Pemerintah mengintervensi calon-calon anggota DPR dari PPP dan PDI setiap Pemilu. Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, harus melalui seleksi khusus yang dikenal dengan istilah Penilitian khusus (Litsus). Proses Lisus calon-calon anggota DPR dan DPRD dilakukan oleh Departemen Dalam Negeri dan Mabes ABRI. Calon usulan PPP dan PDI yang diterima biasanya mereka yang memiliki rekam jejak yang akomodatif terhadap pemerintah. Calon anggota DPR dan DPRD yang pernah bersikap kritis kepaa pemerintah, tidak akan pernah lolos menjadi calon DPR.

Presiden Soeharto menggunakan Golkar sebagai sarana legitimasi politiknya. Tujuannya adalah untuk memperoleh suara mayoritas rakyat dalam Pemilu. Presiden Soeharto dalam struktur organisasi Golkar menduduki posisi sebagai Ketua Dewan Pembina yang memiliki kekuasaan tertinggi organisasi. Ketua Dewan Pembina memiliki kekuasaan khusus dalam organisasi antara lain adalah membatalkan keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar dan dapat menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) Luar Biasa. Ketua Dewan Pembina dalam prakteknya yang mengendalikan Golkar sepenuhnya, sementara DPP hanya sebatas menjalankan instruksi ketua Dewan Pembina. Pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota, gubernur dan bupati/walikota bertindak sebagai Ketua Dewan Penasehat untuk tingkat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) tingkat provinsi dan Dewan Pertimbangan Daerah (DPD) tingkat kabupaten/kota. Golkar selama Pemilu Orde Baru, keluar sebagai pemenang dalam Raihan suara pemilih.

**Tabel 4. Partai Politik Berdasarkan Perolehan Suara Pemilu 1971**

|  |  |
| --- | --- |
| **Partai** | **Perolehan Sura Pemilu** |
| 1. Golkar
 | 62,82 % |
| 1. PNI
 | 6,93 % |
| 1. Parmusi
 | 5,36 % |
| 1. NU
 | 18, 68 % |
| 1. Parkindo
 | 1,4 % |
| 1. Katolik
 | 1,10 % |
| 1. Perti
 | 0,69 % |
| 1. IPKI
 | 0,61 % |
| 1. Murba
 | 0,08 % |
| 1. PSII
 | 2,39 % |

 Sumber: Diolah

**Tabel 5. Perolehan Suara Golakar Pemilu 1977 - 1997**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Golkar** |  **PPP** | **PDI** |
| 1. Pemilu 1977
 | 62,11 % | 29,29% | 8,6 % |
| 1. Pemilu 1982
 | 64,34%  | 27,78 % | 7,88 % |
| 1. Pemilu 1987
 | 72,16 % | 15, 97 %,  | 10,87 % |
| 1. Pemilu 1992
 | 60,1 % | 17 % | 14,89 |
| 1. Pemilu 1997
 | 74,51 % | 22,43 % | 3 % |

 Sumber: Diolah

Presiden Soeharto menjadikan Golkar sebagai sarana memperoleh uang. Keuangan Golkar dikelola dalam bentuk yayasan yang terkenal adalah Yayasan Dana Abadi Karya Bakti (Dakab) yang didirikan pada bulan Juli 1985. Yayasan Dakab diketua oleh Presiden Soeharto dan dibantu oleh Bambang Trihatmodjo sebagai sekretaris dan Hutomo Mandala Putra sebagai bendahara. Tujuan didirikannya Yayasan Dakab adalah untuk mendukung pendanaan Golkar, terutama untuk pemenangan Pemilu dan dana untuk perjuangan Golkar membela dan mempertahankan Pancasila dan UUD 1945.

Sumber dana Dakab berasal dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terutama Pertamina, Pengusaha (Cukong).[[43]](#footnote-43) Sumber lainnya keuangan Dakab berasal dari internal Golkar yaitu dari pegawai negeri sipil dan anggota Fraksi Karya Pembangunan (F-KP) DPR, F-KP DPRD I, dan F-KP DPRD II. Besaran sumbangan masing kelompok tersebut dapat dilihat pada tabel.

**Tabel 6. Sumber Uang Internal Golkar[[44]](#footnote-44)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Sumber** | **Besaran** |
| PNS Golongan I | Rp 5000 |
| PNS Golongan II | Rp 8000 |
| PNS Golongan III | Rp 12.000 |
| PNS Golongan IV | Rp 30.000 |
| F-KP DPR | RP 750.000 |
| F-KP DPRD I | Rp 600.000 |
| FKP II | Rp 300.000 |

Kekuasaan peneglolalan dana Yayasan Dakab berada di tangan Presiden Soeharto. Pengelolaan dana tidak dilakukan secara ekslusif dan tidak transparan. Jumlah keuangan dan penggunaan keuangan Yayasan Dakab hanya diketahui oleh Presiden Soeharto dan anaknya Hutomo Mandala Putra yang menjadi bendahara. Dana Dakab selain digunakan untuk kepentingan organisasi Golkar, juga digunakan untuk biaya-biaya politik khusus yang ditentukan oleh Presiden Soeharto.

Kekuasaan Presiden Soeharto mengendalikan MPR/DPR melalui F-Golkar dan D-ABRI. Kebijakan MPR/DPR selama Orde Baru selalu selaras dengan kehendanya. Hal ini dimungkinkan karena Golkar selama Pemilu masa Orde Baru yaitu Pemilu 1971-Pemilu 1997 meraih suara rata-rata 50,60 % kursi di DPR. FPP dan FPDI memperoleh masing-masing sebesar 19 % dan sebesar 7,33 %, apabila dujumlahkan kedua fraksi ini hanya berjumlah 26,33%. Kekuatan FKP ditambah dengan F ABRI sebesar 20 %. Sebagaimana diketahui anggota FABRI di DPR ditunjuk oleh Presiden Soeharto dan merupakan komponen dari organisasi Golkar.

**Tabel 7. Peta Kekuatan DPR 1971-1997**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pemilu Tahun** | **F-KP** | **F-PP** | **F-PDIP** | **F-ABRI** | **Jumlah** |
| 1971 | 230 (50) | 94 (20,44) | 30 (6,52) | 100 (21,74) | 460 (100) |
| 1977 | 232 (50,43) | 99 (21,52) | 29 (6.30) | 100 (21,74) | 460 (100) |
| 1982 | 246 (53, 48) | 94 (20, 43) | 24 (5,22)  | 100 (21, 74) | 460 (100) |
| 1987 | 299 (59,80) | 61 (12,20) | 40 (8,00) | 100 (20) | 500 (100) |
| 1992 | 282 (56,40) | 62 (12,40) | 56 (11,20) | 100 (20) | 500 (100) |
| 1997 | 325 (65) | 89 (17,80) | 11 (2,20) | 75 (15) | 500 (100) |

 Sumber Olahan: DPR RI, Pusat Pengkajian.dan Pelayanan Informasi.

Data tersebut memberikan gambaran, Golkar merupakan mayoritas mutlak di DPR. Komposisi DPR yang demikian, dijadikan sarana legitimasi oleh Presiden Soeharto melaksanakan berbagai kebijakannya dalam bentuk Undang-Undang sesuai dengan kehendak Presiden Soeharto. Sejumlah Undang-Undang yang lahir pada masa ini seperti UU Kepartaian, Undang Pemlu dan lainnya merupakan bagian dari politik Presiden Soeharto.

**Tabel 8. Peta Kekuatan MPR 1971-1997**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Periode** | **FPP** | **FKP** | **FPDIP** | **FABRI** | **FUD** | **N** |
| 71-77 | 14.13 | 43.59 | 4,67 | 25,00 | 12,60 | 100 |
| 77-82 | 14,38 | 41, 73 | 4,24 | 25,00 | 14,68 | 100 |
| 82-87 | 13,37 | 43,04 | 3,48 | 25,00 | 15,21 | 100 |
| 87-92 | 9,30 | 54,80 | 6,10 | 15,10 | 14,70 | 100 |
| 92-97 | 9,30 | 54,80 | 6,10 | 15,10 | 20,49 | 100 |
| 97-99 | 13,40 | 48,80 | 1,60 | 11,30 | 20,49 | 100 |
| % rata-rata | 12,30 | 45,73 | 4,75 | 24,40 | 16,32 | 100 |

Komposisi kekuatan politik di MPR yaitu FPP, FKP FPDIP, FABRI, dan Fraksi Utusan Daerah (FUD) di MPR seperti pada tabel tersebut di atas, terlihat rata kekuatan FKP rata-rata mencapai 45,73 %, sementara FPP rata-rata mencapai 12,30 %, FPDP rata-rata 4,75 %, kalau dijumlahkan menjadi 17,5%. kekuatan FKP ini didukung oleh kekuatan FABRI dan FUD masing-masing 24,40 % dan 16, 32 %. Kekuatan FKP di MPR sebesar 45,73 % +24,40 % +16,32 % = 96,19 %. Sebagaimana diketahhui anggota FABRI dan anggota FUD MPR diangkat oleh Presiden Soeharto. MPR dijadikan sarana legitimasi oleh Presiden Soeharto untuk terpilih menjadi Presiden. Fungsi MPR salah satunya adalah memilih presiden dan wakil presiden. Komposisi MPR yang demikian sudah jelas akan memilih Presiden Soeharto menjadi Presiden RI.

Kepemimpinan Presiden Soeharto bergaya otoriter-represif terlihat dalam menangani kelompok separatis khusus Gerakan Aceh Merdeka (GAM), menjalankan pendekatan militer dan represif, dengan menjadikan wilayah Aceh sebagai Daerah Operasi Militer (DOM). GAM lahir pada tanggal 4 Desember 1976 lahir gerakan separatisme dari sekelompok masyarakat di Aceh. Pemimpinnya adalah Teungku Hasan M. Di Tiro (Hasan Tiro). GAM menghendaki Aceh sebagai suatu daerah yang merdeka. Munculnya GAM ini didasari ketidakpuasan terhadap perlakuan pemerintah pusat terhadap pembangunan di Aceh. Pemerintah pusat dianggap tidak memiliki kesungguhan dalam pembangunan Aceh, pada hal Aceh memiliki sumber daya alam yang cukup yang salah satunya adalah *Liquified Natural Gas* (LNG) di Aceh Utara.[[45]](#footnote-45)

Presiden Soeharto mengendalikan MA secara tidak langsung, yakni melalui F-KP dan F-ABRI. Pencalonan Ketua MA berasal usulan DPR sebanyak 3 orang, kemudian salah satu diantaranya dipilih dan ditetapkan Presiden. Proses usulan DPR inilah Presiden Soeharto memiliki kewenangan menentukannya, karena jabatannya sebagai Ketua Dewan Pembina Golkar yang memiliki kewenangan tertinggi organisasi.

Kepemimpinan Presiden Soeharto bergaya demokratis-responsif, ketika tekanan kelompok pro-reformasi yang dimotori mahasiswa menuntut Presiden Soeharto mundur jabatannya, yang dianggap tidak mampu untuk mengatasi krisis ekonomi dan krisis politik. Tekanan kelompok pro-reformasi ini didukung oleh MPR/DPR. Presiden Soeharto menyatakan berhenti sebagai Presiden pada tahun 1998. Posisinnya digantikan oleh Wakil Presiden B.J. Habibie pada tahun 1998.

Penjelasan tersebut di atas, memberikan gambaran kepemimpinan Presiden Soeharto mengendalikan politik Indonesia secara sentralisasi, dengan kekuasaan puncak berada di tanggannya, tanpa ada satu kekuatanpun yang mampu mengorolnya. Kepemimpinan Presiden Soeharto dalam menjalankan kekuasaan cenderung bergaya solidarity maker dalam konsep Herberth Feith, karena mengutamakan persatuan bangsa, dan pembangunan bangsa dalam arti luas, sebagaimana dikatakannya dalam membahas konsepsinya tenang partai politik dan Pancaila khususnya sila persatuan Indonesia dan sila kerakyatan:

“partai politik merupakan wadah penyaluran aspirasi-aspirasi rakyat dan sarana pembinaan kesadaran politik masyarakat. Partai politik dan organisasi sosial politik lainnya harus mempunyai semangat dan berorientasi kepada pembangunan bangsa. Partai politik bukan sekedar alat untuk memperoleh pengikut sebanyak-banyaknya, bukan sekedar alat memenangkan Pemilu, bukan sekedar alat untuk memperoleh kekuasan dalam pemerintahan.”[[46]](#footnote-46)

“Sila persatuan, merupakan pedoman bagi rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sikap mempertimbangkan kepentingan persatuan bangsa dalam setiap kebijakan dan prilaku kelompok dalam masyarakat. Karena bangsa Indonesia bersifat majemuk yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya. Bangsa ini bersatu karena ada kesepakatan bangsa Indonesia untuk berhimpun menjadi satu bangsa yakni bangsa Indonesia. Persatuan bukan berarti menghilangkang keragaman rakyat Indonesia, bersatu memupuk persamaan dan mengurang perbedaa-perbedaan yang muncul. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dan perwakilan. Sila ini pada dasarnya adalah demokrasi. Dalam pengambilan keputusan dalam semua tingkatan baik pemerintah maupun organisasi kemasyarakatan harus melalui sistem demokrasi. Sistem demokrasi yang dianut bangsa Indonesia adalah Musyaawarah dan Mufakat. Apabila proses Musyawarah mufakat tidak tercapai, jalan kedua yang ditempuh adalah *voting.* Apabila sudah melakukan *voting,* apapun keputusannya semua harus menerima dan mematuhi hasilnya. Karena pelaksanaan *voting,* merupakan hasil kesepakatan bersama.”[[47]](#footnote-47)

Ungkapan Presiden Soeharto tersebut di atas mengisyaratkan bahwa dalam memerintah mengutamakan simbol. Makna lainnya yang tersirat dalam ungkapan Presiden Soeharto tersebut adalah bahwa partai politik seperti itulah yang hendak dibangun Presiden Soeharto sebagai pemimpin dan rakyat seharusnya mengikuti saja kehendak pemimpinnya. Kosenp kepemimpinan Herberth Feith tentang kepemipinan Solidarity maker masih relevan untuk menjelaskan kepemimpinan Presiden Soeharto, yakni berorientasi pada pembangunan kewibawaan pemerintah (*legitimation*), rakyat harus punya kesan positif dan patuh pada pemerintah.

Varibel lingkungan yang mempengaruhi kepemimpinan Presiden Soeharto adalah latar belakang budayanya yang berasal dari Masyarakat Jawa, dimana nilai-nilai budaya Jawa melekat dalam kehidupannya. Masyarakat Jawa menghendaki pentingnya rakyat patuh pada pemimpin, karena keberadaannya merupakan sebuah takdir. Budaya Masyarakat Jawa menghendaki keharmonisan, ketentraman atau stabilitas dalam pemerintahan.

Varibel lainnya adalah latar belakang karir Presiden Soeharto yang berprofesi sebagai tantara. Organisasi tantara pada dasarnya bersifat hirarki dan komando tertinggi berada di tangan panglimanya, dan pada level bawah kekuasaan tertinggi berada pada komandan pada semua level. Sebagai anggota, organisasi tantara menghendaki anggota patuh pada perintah atasan. Jabatan terakhir Presiden Soeharto sebelum jadi tantara Palima Komando Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) berpangkat MaYor Jenderal (Mayjend).

Vaiabel pendukung adalah situasi politik dan ekonomi pada saat menjadi presiden, dihadapkan pada kondisi Indonesia krisis ekonomi yang cukup parah. Bidang politik, konflik politik terus berlangsung terutama kelompok masyarakat yang anti PKI. Variabel ini merupakan faktor pendukung gaya kepemimpinan Presiden Soeharto yang mengutamakan stabilitas politik dan pembangunan ekonomi membutuhkan persatuan bangsa untuk mengatasinya, karena hanya dengan cara itu pembangunan bangsa di segala bidang kehidupan bisa dilaksanakan.

1. **Kepemimpinan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (2004-2014)**

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terpilih menjadi pada Pemilu tahun 2004 dan pemilu tahun 2009 melalui pemilihan presiden (Pilpres) secara langsung. Pemilu tahun 2004, Pasangan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono/Yusuf Kala behasil meraih 33,58 % suara pemilih, sementar pasangan lainnya Megawati Soekarnoputri/Hasyim Muzadi meraih 26,24 % pada puran Pemilu kedua. Pada Pemilu 2009, Pasangan Soesilo Bambang Yudhoyono/Budiono Kembali terpilih menjadi presiden dengan Raihan suara sebesar 60,80 %, mengalahkan pasangan Megawati Soekarnoputri/Prabowo Subianto hanya meraih suara sebesar 26,79 % suara pemilih. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam membangun kabinet tahun 2004 dan 2009 membentuk kabinet berkoalisi dengan partai pendukung.[[48]](#footnote-48)

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam membangun kabinet pada tahun 2004 dan 2009, membentuk kabinet koalisi dengan sejumlah partai politik pendukung. Partai yang tergabung dengan koalisi dan kekuatan koaalisi Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono dilihat dari perelahan kursi di DPR tahun 2004 dan 2009 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 9. Partai Koalasi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono**

**Tahun 2004 dan 2009**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Partai Koalisi** | **Kursi 2004** | **Kursi 2009** |
| PD (pendukung utama) | 56 | 149 |
| Partai Golkar | 127 | 106 |
| PPP | 58 | 37 |
| PAN | 53 | 46 |
| PKB | 52 | 28 |
| PBB | 11 | - |
| PKS | 45 | 57 |
| PKPI | 1 | - |
| Jumlah | 403 | 423 |
|  |  |  |

 Sumber: diolah

Tabel tersebut di atas menggambarkan bahwa, pada tahun 2004 Presiden Yudhoyono terpilih menjadi presiden melalui Pemilu langsung, namun kekuatan PD sebagai partai pendukung utama Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono di DPR merupakan minoritas, hanya memperoleh 56 kursi dari 550 kursi. Data tersebut di atas memberikan pemahaman, PD sebagai partai pendukung utama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, hanya memperoleh sebanyak 149 dari 560 kursi DPR, kekuatan ini tidak cukup untuk mendukung kebijakan-kebijakan-kebijakan presiden di DPR, koalisi merupakan sebuah solusi untuk memperbesar dukungan DPR kepada kebijakan-kebijakan Presiden. Partai yang tidak termasuk dalam barisan koalisi yaitu PDIP, Gerindra, dan Hanura. Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2009, membentuk Sekretariat Gabungan Partai Politik Pendukung Pemerintah (Satgas Koalisi), dan menjadikan Aburizal Bakrie Ketua Umum Partai Golkar sebagai Ketua Harian Satgab Koalisi. Kebijakan ini sebagai upaya membangun soliditas koalisi.

Presiden Bambang Yudoyono membangun relasi dengan DPR dan MA, sesuai prosedur kontitusi yang berlaku. Relasi dengan DPR, Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono memanfaat forum konsultasi Presiden-DPR berkaitan dengan kebijakan-kebijakan strategis yang akan diambil, terutama yang mungkin menimbulkan pro-kontra dalam masyarakat, seperti kasus penyelesaian GAM di Aceh.

Penjelasan tersebut di atas memberikan gambaran kepemimpinan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono tidak relevan dikatorikan apa disebut Herbert Feith dengan solidarity maker atau administrator. Alternatifnya adalah kepemimpinan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono memiliki gaya demokratik-responsif. Mengajak semua partai politik untuk mendukung pemerintahan dengan imbalan memberi jatah kursi menteri bagi partai yang tergabung dalam koalisi sesuai prosesntase jumlah kursi DPR.

Kebijakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam menyelesaikan kelompok separatism GAM, mengutamakan pendekatan perdamaian, dengan cara mengutamakan dialog dengan tokoh-tokohnya, dan menyertakan aktor internasional. Kebijakan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono tersebut memcapai hasil. Pada tanggal 15 Agustus 2005 tercapai kesepakatan antara pemerintah dengan GAM, yang diwujudkan dengan penandatanganan Memorandum of Understandingbertempat di Helsinki Finlandia. Perjanjian ini dikenal dengan istilah MoU Helsinki. Perjanjian damai tersebut melibatkan *Crisis Management Initiative* (CMI). Implementasi MoU Helsinki di Aceh, melibatkan aktor internasional antara lain negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa dan negara-negara ASEAN.[[49]](#footnote-49)

Kebijakan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono bidang internasional antara lain adalah memprakarsai membentu Bali Democracy Forum (BDF) yakni forum tahunan antar sebagai kerjasama dalam mengembangkan demokrasi serta platform untuk mempromosikan demokrasi dan perdamaian sebagai solusi dan pencegahan konflik antar negara. Forum ini diadakan setiap tahun, bulan Desember di Bali, Indonesia. Forum ini bertujuan untuk memajukan dan membina kerja sama regional dan internasional di bidang perdamaian dan demokrasi dengan memfasilitasi dialog melalui berbagi pengalaman dan praktik terbaik dalam mengelola keragaman yang mendorong kesetaraan, saling pengertian, dan rasa hormat.[[50]](#footnote-50) BDF berhasil menjadikan demokrasi sebagai agenda strategis di kawasan Asia-Pasifik. BDF berhasil memfasilitasi dalam membangun keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan politik, antara menciptakan perdamaian dan keamanan, dan mempromosikan kualitas hak asasi manusia dan nilai-nilai kemanusiaan di kawasan, yang semuanya tercermin dalam tiga pilar pendiri Piagam PBB.

 BDF menerapkan prinsip *home-grown democracy* dalam penyebaran demokrasi*.* Maksud dari prinsip tersebut adalah Indonesia, sebagai tuan rumah sekaligus inisiator BDF, berpatokan pada praktik-praktik nyata nilai demokrasi oleh negara peserta dengan tidak berpretensi untuk menyalahkan atau membenarkan praktik nyata tersebut. BDF secara praktik bersifat inklusif. Sebab demokrasi bisa berhasil ketika demokrasi bersifat inklusif dan semua orang memiliki kesempatan berkontribusi pada proses demokrasi.[[51]](#footnote-51)

Pertemuan BDF pertama diadakan di Bali pada tanggal 10-11 Desember 2008 dan dihadiri oleh 32 Perwakilan negara-negara Asia Pasifik sebagai delegasi dan delapan perwakilan negara-negara Eropa dan Amerika Serikat sebagai pengamat (Institute for Peace and Democracy, 2008). BDF I, yang mengusung tema "Membangun dan Konsolidasi Demokrasi: Agenda Strategis untuk Asia" memiliki tujuan utama untuk membangun dan mengkonsolidasikan nilai-nilai demokrasi setelah krisis keuangan 1997 menghantam beberapa negara di benua Asia.

 Dalam pidato pembukaan pertemuan pertama BDF, Presiden SBY mengatakan,

“Dan sepanjang jalan, kami belajar banyak hal. Kami belajar bahwa pada kebangkitan dari setiap tantangan yang kami hadapi - baik itu terorisme, konflik etnis, atau krisis ekonomi - respons kami, naluri kami adalah untuk selalu memperkuat, bukannya mengurangi, demokrasi –yaitu apa yang kami sebut sebagai "respons demokratis (*democratic response*)."[[52]](#footnote-52)

Ungakapan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono tersebut di atas memperkuat argument, bahwa SBY memiliki gaya kepemimpinan demokratik-responsif, yaitu mengutamakan dialog dalam menyelesaikan masalah, terbuka, dan inklusif dalam menyelenggarakan kekuasaan.

Variabel utama yang membentuk kepemimpinan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono seperti itu, dipengaruhi lingkungan nasional dan lingkungan internasional. Lingkungan nasional adalah bangsa Indonesia sedang mengalami proses demokratisasi semenjak tahun 1998. Faktor internasional proses globalisasi dalam semua bidang kehudupan politik, sosial dan ekonomi. Konsekwensinya adalah kerjasama, perdamaian, dan terbuka dengan melibatkan dunia internasional dalam menyelesaikan persoalan-persoalan dalam negeri. Pengaruh budaya masyarakat jawa dan latar belakang profesi tantara tidak menonol dalam kepemimpinan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono.

E. **Simpulan**

Kepemimpinan Presiden Soekarno bergaya solidariy maker yang mengutamakan simol-simbol persatuan bangsa dalam melaksanakan kekuasaannya seperti konsepsinya tentang demokrasi terpimpin. Variabel utama yang mempengaruhi kepemimpinannya aalah budaya Masyarakat Jawa yang mengutamakan legitimasi dan kepatuhan rakyat dalam melaksanakan kekuasaannya. Variabel pendukungnya adalah situasi politik yang dihadapkan pada masa demokrasi parlementer yang diwarnai konflik antar elite.

Kepemimpinan Presiden Soeharto memiliki kepemimpinan solidarity maker, mengutamakan simbo-simbol persatuan bangsa, stabilitas politik, dan pembangunan disegala bidang. Kepemimpinan model tampak melihat konsepsinya tentang Pancasila khususnya sila persatuan Indonesia dan konsepsinya tentang partai politik. Variabel utama yang mempengaruhi kepemimpinannya yang seperti itu adalah budaya masyarakat Jawa dan latar belakang profesi sebagai tantara yang terbiasa dengan sistem hirarki organisasi dan komando. Variabel pendukungnya adalah situasi krisis politik dan krisis ekonomi yang dihadapi sebelum menjabat presiden.

Kepemimpinan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono memiliki gaya demokraik-responsif, dengan ciri mengutamakan cara-cara kompromi, konsultasi, dan adaptasi dengan lingkungan nasional dan internasional. Ciri ini kelihatan dalam membentuk kabinet dengan melakukan koalisi dengan partai pendukung, penyelesaian masalah kelompok sepratis GAM di Aceh dengan cara damai dan melibatkan aktor internasional, dan membentuk BDF dengan agenda membangun demokrasi berdasarkan jati negara negara-negara peserta.

Varibel pendukung utama kepemimpinan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono yang demikian lebih banyak dipengaruhi lingkungan domestik dan lingkungan internasional. Lingkungan domestik dimaksud adalah Indonesia semenjak tahun 1998 memasuki era demokratisasi, memaksa presiden untuk menyesuaikan dengan proses demokrasi dalam menyelenggarakan kekuasaannya seperti mengutama cara persuasif, dialog, dan kerjasama. Lingkungan internasional, seorang presiden harus menyesuaikan diri dengan proses globalisasi bidang politik dan ekonomi, salah satunya menghendaki kerjasama dalam menyelesaikan berbagi persoalan yang dihadapi.

Beberapa temuan penelitian ini yaitu pertama, kepemimpinan Presiden Soekarno bergaya demokratik-responsif terjadi Ketika terjadi tekanan massa yang didukung Angkatan Darat yang menuntut mundur dari jabatannya akibat krisis politik dan ekonomi. Kedua, kepemimpinan Presiden Soeharto memiliki gaya demokratik-responsif terjadi Ketika tekanan kelompok pro-reformasi yang didukung MPR/DPR yang menuntutnya mundur dari jabatannya akibat krisis ekonomi.

Teori Herberth Feith, tentang kepemimpinan solidarity maker untuk menjelaskan kepemimpinan Presiden Soekarno, dapat juga menjelaskan kepemimpinan Presiden Soeharto, yang memiliki kepemimpinan solidarity maker karena mengutamakan simbol persatuan, stabilitas dalam menjalankan kebijakannya. Variabel utama yang mempengaruhi kepemimpinan Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto bergaya solidarity maker adalah faktor budaya Masyarakat Jawa mengutamakan kepatuhan rakyat dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Teori Herberth Feith tidak relevan untuk menjelaskan kepemimpinan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono yang memiliki kepemimpinan demokratik-responsif. Variabel utama yang mempengaruhi kepemimpinan Soesilo Bambang Yudhoyono adalah situasi lingkungan domestik yang sedang mmenjalani proses demokratisasi dan situasi lingkungan internasional yang sedang proses globalisasi politik dan ekonomi. Model penjelasan kepemimpinan tiga presiden Indonesia dimaksud dirumuskan dalam bagan berikut.

Kepemimpinan Presiden:

1. Solidarity Maker (Soekarno, Soharto) :

2. Demokratik-Responsif (Soesilo Bambang Yudhoyno)

Lingkungan Domestik: Budaya Jawa, latar profesi, situasi politik dan ekonomi dalam negeri

Lingkungan Internasional: Globalisasi dan Demokratisasi

**Daftar Pustaka**

Alfian, *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia, 1980.

Assche, Tobias van, Leadership and and Decision Making, John T. Ishiyama &

Marijke Breuning (Ed), *21st Century Political Sience a Refernce Handbook*, Los Angeles-London, New Delhi, Singapore, Wasington DC: Sage Publication Inc, 2011.

Barber, James David. *The Presidential character: Predicting Performance in the*

*White House*, (tird edition) Englewood Cliffs, NJ: Prantice Hall, 1992.

Deen, Rebecca E., “The Presidency,” John T. Ishiyama & Marijke Breuning (Ed),

*21st Century Political Sience a Refernce Handbook*, Los Angeles-London, New Delhi, Singapore, Wasington DC: Sage Publication Inc, 2011.

Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 1981.

Feith, Herbert, *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*, Ithaca and

London: Cornel University Press, 1962.

Feith Herbert, & Lance Castles (ed), *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*, Jakarta:

LP3ES, 1988.

Gaffar, Afan, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi,* Yogyakarta: Pustaka

Pelajar, 2000.

Hadiz, Vedi R., *Dinamika Kekuasaan Ekonomi Politik Indonesia pasca-Soeharto,*

Jakarta, LP3ES, 2005.

Harrison,Lisa, *Political Research: An Introdauctin,* Routledge: Psychology Press, 2001, pp. 19-52.

Haris, Syamsuddin, “Koalisi dalam Demokrasi Sistem Presidensial Indonesia:

Faktor-Faktor Kerapuhan Koalisi Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono” *Jurnal Penelitian Politik*, Vol 8, No.1, 2011, h. 1-14.

Hatta, Mohammad, “Demokrasi Kita” dalam Mohammad Hatta*, Kumpulan Pidato*, Jakarta: Yayasan Idayu,1981.

Jalal, Asran, “Membangun Hubungan kekuasaan Presiden-DPR Menuju Politik Konsolidasi”, dalam Robi Nur Hadi dan Safrizal Rambe, *Profil Politik Indonesia Pasca Orde Baru*, Jakarta Pusat Studi Politik Indonesia (PSPI) FISIP UNAS dan Pusat Studi Politik (PSP) Madani Institute, 2005.

Jensic, Alicia, Qualitative VS Quantitative Research, John T. Ishiyama &

Marijke Breuning *21st Century Political Sience ARefernce Handbook*, Los Angeles-London, New Delhi, Singapore, Wasington DC: Sage Publication Inc, 2011.

King, Dwight Y. Indonesia’s New Order as Bureaucratic Politiy, a Neopatrimonial Regime or a Bureaucratic Authoritritarian Regime: What Difference Doe It Make? Benecict Anderson and Audrey Kahin (ed), *Interim Reports Series Publication No. 62, Cornell Modern Indonesia Project Southeast Asia Program*, New York: Cornell Uniniversity Ithaca, 1982.

Krissantono (ed), *Pandangan Presiden Soeharto tentang Pancasila*, Jakarta: CSIS,

1976.

Linz, Juan. “The Perils of Presidensialism, *Journal of Democracy* 1 (1) 51-69.

DOI:10.1353/jod.1990.0011.

Mas’oed, Mohtar, “Lembaga Kepresidenan dan Resep Pengendalian Politik

Indonesia”, dalam Reza Noer Arfani, *Demokrasi Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Nazaruddin, Sjamsuddin, *Integrasi Politik Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1989.

Robbins, Joseph W. Presidentialism Versus Parliamentarism, John T. Ishiyama &

Marijke Breuning (Ed), *21st Century Political Sience A Refernce Handbook*, Los Angeles-London, New Delhi, Singapore, Wasington DC: Sage Publication Inc, 2011.

Skowronek, Stephen, *The Politics Presidents Make: Leadership from John Adam to*

*Bill Clinton*, Cambridge, Massachusetts, London, Enggland: Harvard University Press, 2000.

Suryadinata, Leo. *Election and Politics in Indonesia*, Singapore, ISEAS, 2002.

Tandjung, Akbar, *The Golkar Way Survival Partai Golkar di Tengah Tubulensi*

*Politik Era T*ransisi, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007.

Rebecca E. Deen, “The Presidency,” John T. Ishiyama & Marijke Breuning (Ed), *21st*

*Century Political Sience a Refernce Handbook*, Los Angeles-London, New Delhi, Singapore, Wasington DC: Sage Publication Inc, 2011, p. 725-735.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Risalah Sidang Badan penyelidik Usaha-*

*Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945-22 Agutus 1945*, Jakarta: 1998.

Soekarno, *Di Bawah Bendera Revolusi*, Vol. I (Panitia Penerbit Di bawah Bendera

Revolusi, cetakan ke 2, 1963, hal. 283.

--------------, *Pancasila Sebagai Dasar Negara*, Jakarta: Inti Idayu Press-Yayasan Pendidikan Soekarno, 1984, h. 123.

Saragih, Bintan R,  *Lembaga Perwakilan Dan Pemilihan Umum di Indonesia*, Jakarta:

Smith. M. Brewster, A Map for Analisys personality and Politics, *Journal of Social*

*Issues*, Vol. 24, No. 23, p.

Takwin, Bagus dan Niniek L. Karim, *Sang Kandidat: Analisis Psikologi Politik Lima*

*Kandidat Presiden da Wakil Presiden RI Pemlu 2004*, Jakarta: Kompas, 2004.

Widjaja, Albert, *Budaya Politik dan Pembangunan Ekonomi*, Jakarta: LP3ES, 1982.

1. Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945-22 Agutus 1945*, Jakarta: 1998. [↑](#footnote-ref-1)
2. Vedi R. Hadiz, *Dinamika Kekuasaan Ekonomi Politik Indonesia pasca-Soeharto,* Jakarta, LP3ES, 2005, h. 265-267. [↑](#footnote-ref-2)
3. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-3)
4. Leo Suryadinata, *Election and Politics in Indonesia*, Singapore, ISEAS, 2002, h. 260-265. [↑](#footnote-ref-4)
5. Syamsuddin Haris, “Koalisi dalam Demokrasi Sistem Presidensial Indonesia: Faktor-Faktor Kerapuhan Koalisi Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono” *Jurnal Penelitian Politik*, Vol 8, No.1, 2011, h. 1-14. [↑](#footnote-ref-5)
6. Herbert Feith, *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*, Ithaca, New York: Cornell University Press, 1962, p. 113-122. [↑](#footnote-ref-6)
7. Afan Gaffar, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h. 27. [↑](#footnote-ref-7)
8. Dwight Y. King, Indonesia’s New Order as Bureaucratic Politiy, a Neopatrimonial Regime or a Bureaucratic Authoritritarian Regime: What Difference Doe It Make? Benecict Anderson and Audrey Kahin (ed), *Interim Reports Series Publication No. 62, Cornell Modern Indonesia Project Southeast Asia Program*, New York: Cornell Uniniversity Ithaca, 1982. P. 104-117. [↑](#footnote-ref-8)
9. Bagus Takwin dan Niniek L. Karim, *Sang Kandidat: Analisis Psikologi Politik Lima Kandidat Presiden da Wakil Presiden RI Pemlu 2004*, Jakarta: Kompas, 2004, h. 239-246. [↑](#footnote-ref-9)
10. Tobias van Assche, Leadership and and Decision Making, John T. Ishiyama & Marijke Breuning (Ed), *21st Century Political Sience a Refernce Handbook*, Los Angeles-London, New Delhi, Singapore, Wasington DC: Sage Publication Inc, 2011, p. 353-361. [↑](#footnote-ref-10)
11. M. Brewster Smith. A Map for Analisys personality and Politics, *Journal of Social Issues*, Vol. 24, No. 23, p. [↑](#footnote-ref-11)
12. Barber, James.D, *The Presidential Character: Predicting performance in the White House*, (third edition), Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hill, 1992. [↑](#footnote-ref-12)
13. Rebecca E. Deen, “The Presidency,” John T. Ishiyama & Marijke Breuning (Ed), *21st Century Political Sience a Refernce Handbook*, Los Angeles-London, New Delhi, Singapore, Wasington DC: Sage Publication Inc, 2011, p. 725-735. [↑](#footnote-ref-13)
14. Herbert Feith, *Op.Cit*, p. 113-122. [↑](#footnote-ref-14)
15. Albert Widjaja, *Budaya Politik dan Pembangunan Ekonomi*, Jakarta: LP3ES, 1982, h. 123. [↑](#footnote-ref-15)
16. *Ibid*, h.129. [↑](#footnote-ref-16)
17. Afan Gaffar, *Op.Cit*, h. 66 [↑](#footnote-ref-17)
18. *Ibid,* h, 67-82 [↑](#footnote-ref-18)
19. *Ibid,* h. 79-80. [↑](#footnote-ref-19)
20. Mohtar Mas’oed, “Lembaga Kepresidenan dan Resep Pengendalian Politik Indonesia”, dalam Reza Noer Arfani, *Demokrasi Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996, h, 67-82.

*Ibid*, h. 97-98. [↑](#footnote-ref-20)
21. *Ibid*, h. 101. [↑](#footnote-ref-21)
22. *Ibid*, h. 105-106. [↑](#footnote-ref-22)
23. Vedi R. Hadiz, *Op.Cit*, h. 265-267. [↑](#footnote-ref-23)
24. *Ibid*, h. [↑](#footnote-ref-24)
25. Jakarta Post, 22 Maret 2000. [↑](#footnote-ref-25)
26. Lisa Harrison, *Political Research: An Introdauctin,* Routledge: Psychology Press, 2001, pp. 19-52. [↑](#footnote-ref-26)
27. Alicia Jensic, Alicia Jensic (2011), Qualitative VS Quantitative Research, John T. Ishiyama & Marijke Breuning *21st Century Political Sience ARefernce Handbook*, Los Angeles-London, New Delhi, Singapore, Wasington DC: Sage Publication Inc, pp. 506-514. [↑](#footnote-ref-27)
28. Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Risalah Sidang Badan penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945-22 Agutus 1945*, Jakarta: 1998. [↑](#footnote-ref-28)
29. Nazaruddin Sjamsuddin dkk, *Sistem Politik Indonesia*, Jakarta: Karunika Universitas Terbuka, 1998, h.8.11. [↑](#footnote-ref-29)
30. Herbert Feith, *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*, Ithaca and London: Cornel University Press, 1962. data juga diperoleh dari perpusnas.co.id, diunduh tanggal 30 Maret 2020. [↑](#footnote-ref-30)
31. Soekarno, *Di Bawah Bendera Revolusi*, Vol. I (Panitia Penerbit Di bawah Bendera Revolusi, cetakan ke 2, 1963, h. 283. [↑](#footnote-ref-31)
32. Bintan R Saragih, *Lembaga Perwakilan Dan Pemilihan Umum di Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1988, h, 119. [↑](#footnote-ref-32)
33. Nazaruddin Sjamsuddin dkk, *Sistem Politik Indonesia*, Jakarta: Karunika Universitas Terbuka, 1998, h.7.23. [↑](#footnote-ref-33)
34. Bintan Saragih, *Op.cit*, h. 119. [↑](#footnote-ref-34)
35. Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 1981, h. 2002. [↑](#footnote-ref-35)
36. Soemarsaid Moertono, *Negara dan Usaha Bina-Negara Di Jawa Masa Lampau Studi Tentang Mataram II*, Abad XVI sampai XIX, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985, h. 25. [↑](#footnote-ref-36)
37. *Ibid*, h. 31-32. [↑](#footnote-ref-37)
38. Sukarno, *Pancasila Sebagai Dasar Negara*, Jakarta: Inti Idayu Press-Yayasan Pendidikan Soekarno, 1984, h. 123. [↑](#footnote-ref-38)
39. *Ibid,* h. 91. [↑](#footnote-ref-39)
40. *Ibid*, h. 105-107. [↑](#footnote-ref-40)
41. Feith, Herbert & Lance Castles (ed), *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*, Jakarta: LP3ES, 1988. h. 105-108 [↑](#footnote-ref-41)
42. *Ibid*, 1988. h. 107. [↑](#footnote-ref-42)
43. Akbar Tandjung, *The Golkar Way Survival Partai Golkar di Tengah Tubulensi Politik Era Transisi*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007, h. 178. [↑](#footnote-ref-43)
44. *Ibid,* h. 173. [↑](#footnote-ref-44)
45. Nazaruddin Sjamsuddin, *Integrasi Politik Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1989, hlm. 119. [↑](#footnote-ref-45)
46. Krissantono (ed), *Pandangan Presiden Soeharto tentang Pancasila*, Jakarta: CSIS, 1976, h. 65-67. [↑](#footnote-ref-46)
47. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-47)
48. Leo Suryadinata, *Op.Cit*. h. 19. [↑](#footnote-ref-48)
49. Naskah MoU Helsinki versi bahasa Indonesia, lihat Ahmad Farhan Hamid, *Jalan Damai Nanggroe Endatu, Catatan Seorang Wakil Rakyat Aceh*, Jakarta: Penerbit Suara Bebas, 2006, bagian lampiran. [↑](#footnote-ref-49)
50. “Bali Democracy Forum”, https://kemlu.go.id/amman/en/news/2595/bali-democracy-forum - diakses pada 14 Desember 2020. [↑](#footnote-ref-50)
51. “Merangkul Demokrasi Inklusif, Menlu Retno Buka Bali Democracy Forum ke-12”, https://kemlu.go.id/portal/id/read/854/berita/merangkul-demokrasi-inklusif-menlu-retno-buka-bali-democracy-forum-ke-12 - diakses pada 16 Dember 2020. [↑](#footnote-ref-51)
52. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2010. [↑](#footnote-ref-52)